

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA DESA  
(BHAKTI SOSIAL MENATA DESA)  
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN MALANG**

(STUDI TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR 180/121/KEP/421.013/2011 TENTANG PENETAPAN  
PROGRAM BUPATI MENYAPA RAKYAT DI DESA PANDANSARI  
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ROSITA DEVI MILASARI  
105030500111009**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN S1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG**

**2014**

## MOTTO

*Kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu membuat orang lain bahagia terlebih itu adalah orang-orang yang kita sayangi*

*(Rosita Devi Milasari)*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

*Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung*

*(QS. Ali Imron:173)*

*Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa pengorbanan dan tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan.*

*(Anonim)*

*HALAMAN PERSEMBAHAN*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Kupersembahkan Skripsiku  
Kepada Bapak dan Ibu tercinta  
Saudara-saudaraku tersayang  
Serta semua sahabat-sahabatku*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang** (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Rosita Devi Milasari

NIM : 105030500111009

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan

Malang, 04 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



**Dr. Bambang Santoso Haryono, MS**  
NIP. 19610204 198601 1 001



**Drs. Romula Adiono, M. AP**  
NIP. 19620401 198703 1 003

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 08 Juli 2014  
Jam : 09.00 – 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Rosita Devi Milasari  
Judul : Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Malang (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

dan dinyatakan lulus

## MAJELIS PENGUJI

Ketua Pembimbing



Dr. Bambang Santoso H, MS  
NIP. 19640204 198601 1 001

Anggota Pembimbing



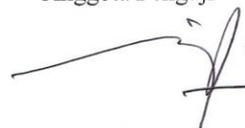
Drs. Romula Adiono, M.AP  
NIP. 19620401 198703 1 003

Ketua Penguji



Drs. Heru Ribawanto, MS  
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota Penguji



Drs. Moch. Rozikin, M.AP  
NIP. 19630503 198802 1 001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 09 Juni 2014



**Rosita Devi Milasari**  
**NIM. 105030500111009**

## RINGKASAN

Rosita Devi Milasari, 2010, **Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malang (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**, Pembimbing Utama Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, Pendamping Drs. Romula Adiono, M.AP, 152 hal + xvi.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai beberapa program dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Malang melalui Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011, tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat mempunyai 3 kegiatan. Kegiatan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan adalah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dan faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Dari hasil penelitian dan analisis implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa (1) Pembangunan di level desa melalui kerja bakti bersama masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur desa serta pemberian bantuan-bantuan. (2) Kegiatan pelayanan publik dan penyuluhan yang dilakukan oleh SKPD terkait secara teknis berlangsung selama 20 jam. (3) Kegiatan penjangkaran aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat Desa Pandansari menyampaikan aspirasinya mengenai infrstruktur dan ekonomi desa. Ada 2 faktor kritis yaitu faktor internal yang meliputi kondisi kebijakan dan sumber daya sedangkan faktor eksternal yang meliputi faktor cuaca dan faktor lokasi.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: agar ada kesesuaian lokasi dan potensi desa dalam pemberian bantuan, ada pengawasan setelah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa), dalam penyampaian informasi pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) lebih merata, serta dalam penataan lalu lintas lebih diperhatikan agar tidak terjadi kemacetan.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)

## SUMMARY

*Rosita Devi Milasari, 2010, The Implementation of Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Policy in order to Prevent Poverty in Malang Regency (Study of Malang Regent Decree No. 180/121/KEP/421.013/2011 About Establishment of Bupati Menyapa Rakyat Program in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency), Supervisor Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, Co Supervisor Drs. Romula Adiono, M.AP, 152 pages + xvi.*

*There are a lot of issues faced by developing countries, one of them is poverty issue. To face this issue, both central government and local government have several programs in preventing poverty in Indonesia. Malang Regency, through Malang Regent Decree No. 180/121/KEP/421.013/2011, about Establishment of Bupati Menyapa Rakyat Program has 3 activities. The activity in that Regent Decree which intends to prevent poverty is Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).*

*This research uses descriptive research type with qualitative approach method. The focuses of this research is implementation of Malang Regent Decree nomor: 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 about the establishment of “Bupati Menyapa Rakyat” program in Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) activity and the critical factors in the implementation of Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) policy in Pandansari Village, Poncokusumo District, Malang Regency.*

*The research results and implementation analysis of Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) policy in order to prevent poverty in Malang Regency show that (1) The development in village level through community service with communities, such as the improvement of village infrastructures as well as the provision of assistances. (2) The activities of public service and socialization performed by related SKPD technically last for 20 hours. (3) Public aspirations activity and community needs of Pandansari Village community conveys their aspirations about village economy and infrastructures. There are 2 critical factors, they are internal factors including the condition of policy and resources; and external factors including weather and location.*

*Some suggestions the writer can convey are: there must be suitability of location and potential village in providing assistances, there must be supervision after Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) activity, conveying information of Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) implementation must be more evenly, and structuring traffic must be paid attention more in order to prevent jam.*

*Keywords: Implementation, Poverty, Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malang (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik dengan Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Koordinator Minat Administrasi Pemerintahan.
4. Ibu Trisnawati, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris Koordinator Minat Administrasi Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku ketua dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian skripsi. Selain itu, juga telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Drs. Romula Adiono, M.AP selaku anggota dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian skripsi. Selain itu, juga telah banyak memberikan masukan

mengenai langkah-langkah yang harus diambil penulis untuk kedepannya dan sangat mendukung langkah saya.

7. Bapak Maslihan dan Ibunda Kastin selaku orang tua yang sangat saya cintai, selalu memberikan doa dan nasehatnya.
8. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan data-data terkait kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).
9. Kantor Desa dan Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan data-data dan bersedia diwawancara.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan data-data terkait kemiskinan di Kabupaten Malang.
11. Sahabat-sahabat kos Mahar 41(Windhy, mbak Ika, Dian, Dita, Ely, mbak Ana, Ani, Nana, Rihan, Khasanah, Emy) yang selalu memberi semangat.
12. Saudara-saudara P@Imagita (mas Hendra, Mira, Risa, Maya, Leli) dan teman kecil saya Eny yang telah menemani saya saat penelitian.
13. Teman-teman Administrasi Pemerintahan angkatan 2010, yang selalu menjadi semangat dan inspirasi dalam melangkah.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	12
C Tujuan Penelitian .....	12
D Kontribusi Penelitian .....	13
E Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A Konsep Kebijakan Publik .....	17
1 Pengertian Kebijakan .....	17
2 Tujuan Kebijakan .....	18
3 Pengertian Kebijakan Publik .....	19
4 Tahap dan Siklus Kebijakan Publik .....	20
B Implementasi Kebijakan .....	22
1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	22
2 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	24
a Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	26
b Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards .....	29
3 Faktor-Faktor Kritis dalam Implementasi Kebijakan .....	31
4 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan .....	33
C Konsep Kemiskinan .....	34
1 Pengertian Kemiskinan .....	34
2 Jenis-Jenis Kemiskinan .....	35
3 Penyebab Kemiskinan .....	36
4 Kriteria Kemiskinan .....	38
5 Pengertian Penanggulangan Kemiskinan .....	39
6 Kebijaksanaan Penanggulangan Kemiskinan .....	40



D Pemberdayaan Masyarakat .....	41
1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	41
2 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat .....	42
3 Pendekatan Pokok dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat ..	43
4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	44
E Pelayanan Publik .....	45
1 Pengertian Pelayanan Publik .....	45
2 Azas Pelayanan Publik .....	45
3 Prinsip Pelayanan Publik .....	46
F Desa Tertinggal .....	49
1 Kriteria Desa Tertinggal .....	49
G Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) .....	51
1 Maksud .....	52
2 Tujuan .....	52
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A Jenis Penelitian .....	54
B Fokus Penelitian .....	55
C Lokasi dan Situs Penelitian .....	57
D Sumber Data .....	57
E Teknik Pengumpulan Data .....	59
F Instrumen Penelitian .....	61
G Metode Analisis .....	63
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A Penyajian Data Umum .....	66
1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
a Kondisi Geografis Kabupaten Malang .....	66
b Kecamatan Poncokusumo .....	67
c Desa Pandansari .....	68
2 Gambaran Umum Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) .....	72
B Penyajian Data Fokus Penelitian .....	80
1 Implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 / KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada program Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) .....	80
a Pelaksanaan pembangunan di level Desa melalui kerja bakti bersama masyarakat setempat maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD .....	80
b Kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di Desa .....	108
c Kegiatan menjangring aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa .....	127
2 Faktor-faktor kritis dalam implementasi kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari	

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang .....	130
a Faktor Internal .....	130
b Faktor Eksternal .....	133
C Analisis dan Interpretasi Data .....	134
1 Implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 / KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada program Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) .....	135
a Pelaksanaan pembangunan di level Desa melalui kerja bakti bersama masyarakat setempat maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD .....	142
b Kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di Desa .....	146
c Kegiatan menjaring aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa .....	152
2 Faktor-faktor kritis dalam implementasi kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang .....	154
a Faktor Internal .....	159
b Faktor Eksternal .....	160
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	164
B Saran .....	165

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1	Jumlah penduduk Kecamatan Poncokusumo .....	68
2	Susunan Panitia Kegiatan Bina Desa Kabupaten Malang .....	77
3	Petugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	81
4	Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	82
5	Bantuan Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak .....	84
6	Kegiatan Dinas Pendidikan .....	86
7	Bantuan Dinas Pendidikan .....	87
8	Kegiatan Badan Diklat .....	89
9	Bantuan dari Badan Diklat .....	90
10	Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	91
11	Kegiatan dan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	92
12	Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .....	94
13	Petugas Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi .....	95
14	Kegiatan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi .....	97
15	Kegiatan Badan Lingkungan Hidup .....	99
16	Bantuan Badan Lingkungan Hidup .....	100
17	Petugas Dinas Bina Marga .....	101
18	Bantuan Dinas Bina Marga .....	102
19	Bantuan dari Dinas Pengairan .....	102
20	Petugas Dinas Kehutanan .....	103
21	Kegiatan dan Pelayanan Dinas Kehutanan .....	105
22	Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	106
23	Kegiatan dari PDAM .....	107
24	Kegiatan dan Pelayanan UPT Perijinan .....	109
25	Kegiatan dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	110
26	Kegiatan dan Pelayanan Dinas Kesehatan .....	111
27	Bantuan Dinas Kesehatan .....	114
28	Kegiatan dan Pelayanan Badan Keluarga Berencana .....	115
29	Bantuan Badan Keluarga Bencana .....	116
30	Petugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .....	116
31	Kegiatan dan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .....	117
32	Petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan .....	119
33	Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan .....	120
34	Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar .....	121
35	Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar .....	122

36	Bantuan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar .....	123
37	Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM .....	124
38	Bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM .....	125
39	Kegiatan dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat .....	126



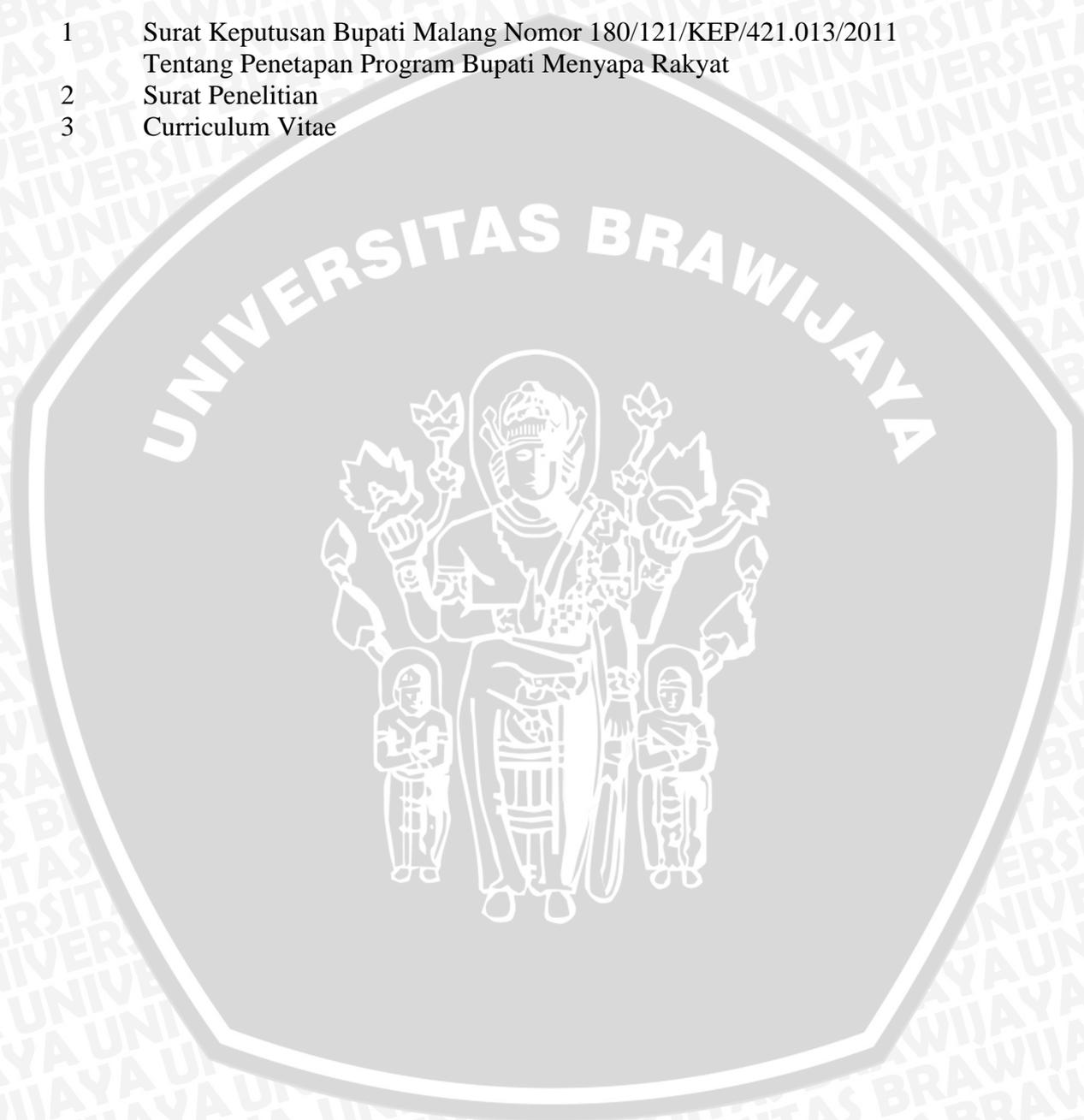
## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hlm.
1	Desa Tertinggal di Kabupaten Malang .....	10
2	Alur Skema Analisis Data ( <i>Interactive Model</i> ) .....	65
3	Peta Desa Pandansari .....	70
4	Struktur Pemerintahan Desa Pandansari .....	71
5	Pemberian PMT-AS oleh Pak Bupati .....	85
6	Pelaksanaan pembinaan kepada wali murid .....	87
7	Penyerahan sepeda kepada siswa kurang mampu .....	88
8	Penyerahan peralatan olahraga oleh Pak Bupati .....	91
9	Penyerahan bibit ikan lele oleh Pak Bupati .....	95
10	Penyerahan bantuan dari Badan Lingkungan Hidup .....	100
11	Pelayanan masyarakat miskin .....	113
12	Pelaksanaan sikat gigi bersama .....	113
13	Demo pembuatan olahan dari krisan .....	118
14	Pelatihan pembuatan kue .....	123



## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul   |
|-----|---|
| 1   | Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011<br>Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat |
| 2   | Surat Penelitian  |
| 3   | Curriculum Vitae  |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang/membangun yang juga digolongkan kepada dunia ketiga dan menyadari bahwa adanya kesenjangan yang semakin besar antara negara maju dengan negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, untuk memperkecil kesenjangan tersebut diperlukan adanya kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah yang di negara berkembang baik masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan dengan melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di berbagai sektor merupakan salah satu ciri dari negara berkembang. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia sebagai negara berkembang dapat memenuhi tuntutan era globalisasi.

Kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan publik karena merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Menurut Parker dalam Abdul Wahab (2008:51), kebijakan publik merupakan suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. Udoji dalam Abdul Wahab (2012:125) menyatakan, “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Abdul Wahab (2012:133), implementasi dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan selalu ditemui beberapa penyebab kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan atau gagal, hal tersebut karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Winarno (2002:126-151) terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu proses komunikasi kebijakan, adanya sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan, kecenderungan atau tingkah laku para pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:156-172)

terdapat 8 variabel yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan pelaksana (*implementor*), kaitan antara komponen-komponen model, masalah kapasitas. Selain itu, juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Zainal Abidin (2012:147-152) yaitu faktor internal yang meliputi kondisi kebijakan, sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, legitimasi, dan partisipasi serta faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan, kondisi fisik, faktor politik, tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang, terjadi penundaan, kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa langkah implementasi, dan kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi fokus utama di negara berkembang seperti Indonesia. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis (<http://nasional.kompas.com>). Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu yaitu biasanya di pedesaan atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Menurut anggota Kaukus Ekonomi Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta dalam harian Kompas hal tersebut

terjadi karena semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang meningkat hampir dua kali lipat selama tahun 2012. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pembangunan mengakibatkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antara desa dan perkotaan. Tidak sedikit desa yang tidak mendapatkan fasilitas publik lengkap seperti halnya di perkotaan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan di tingkat daerah, kota/kabupaten menjadi pelaku strategis untuk langsung melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya karena pemerintah kota/kabupaten lebih mengenal secara dekat karakteristik dan tingkat kemiskinan di wilayahnya, sehingga untuk menyusun strategi, kebijakan dan program yang bersifat khusus tidak dapat mengandalkan strategi dan kebijakan di tingkat pusat. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pemerintah mempunyai beberapa program dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program penanggulangan kemiskinan di Indonesia terbagi atas tiga kelompok klaster yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yaitu:

a. **Klaster I**

Kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Jenis program klaster I yaitu jamkesmas, program keluarga harapan, Raskin (beras untuk keluarga miskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM).

b. **Klaster II**

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jenis program klaster II yaitu PNPM Mandiri.

c. **Klaster III**

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Jenis program klaster III yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). (<http://www.tnp2k.go.id/>)

Selain program di atas, juga terdapat program penanggulangan kemiskinan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota yang masing-masing mempunyai program tersendiri dalam menanggulangi kemiskinan dan salah satu daerah yang mempunyai program tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

Menurut Dr. Nehruddin, SE., MM. sebagai kepala Bappeda Kabupaten Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Malang, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 Kabupaten Malang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dimana penanggulangan kemiskinan menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional. Dalam rangka peningkatan dan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memudahkan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalankan peran dan fungsinya, terutama terkait dengan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang dapat berjalan secara merata, terpadu lintas sektor serta tepat sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Malang membagi wilayahnya ke dalam beberapa Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) seperti yang tercantum dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Kabupaten Malang oleh Dr. Nehrudin, SE., MM. sebagai kepala Bappeda Kabupaten Malang, yaitu:

1. SWP I (Ngantang dan sekitarnya), meliputi Kecamatan Kasembon, Ngantang, dan Pujon.
2. SWP II (Lingkar Kota Malang) meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Singosari, Pakis, Tajinan, Bululawang, Pakisaji dan Wagir.
3. SWP III (Lawang), meliputi Kecamatan Lawang.
4. SWP IV (Tumpang dan sekitarnya) meliputi Kecamatan Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak.
5. SWP V (Kepanjen dan sekitarnya) meliputi Kecamatan Wonosari, Ngajum, Kepanjen, Kromengan, Sumberpucung, Pagak dan Kalipare.
6. SWP VI (Donomulyo) meliputi Kecamatan Donomulyo.
7. SWP VII (Gondanglegi dan sekitarnya) meliputi Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagelaran dan Gondanglegi.
8. SWP VIII (Dampit dan sekitarnya) meliputi Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading dan Sumbermanjing Wetan.

Posisi strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Malang tersebut menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Namun demikian, permasalahan kemiskinan masih tetap menjadi bagian permasalahan yang utama.

Program-program penanggulangan kemiskinan selama ini berjalan di Kabupaten Malang cenderung parsial dan masih terpusat. Menurut Dr. Nehrudin, SE., MM. sebagai kepala Bappeda Kabupaten Malang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Malang masih sangat sedikit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang secara eksplisit mencantumkan tentang program penanggulangan kemiskinan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki program penanggulangan kemiskinan seperti PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) yang bertujuan untuk mengalihkan subsidi menjadi kegiatan pembangunan untuk masyarakat miskin, Program Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat alokasi dana dengan pola *Cost Sharing* atau *Block Grant* melalui Dana Pusat, Propinsi dan Daerah, dan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh SKPD Terkait yang dibiayai melalui dana APBD murni daerah, sebagai wujud komitmen partisipasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

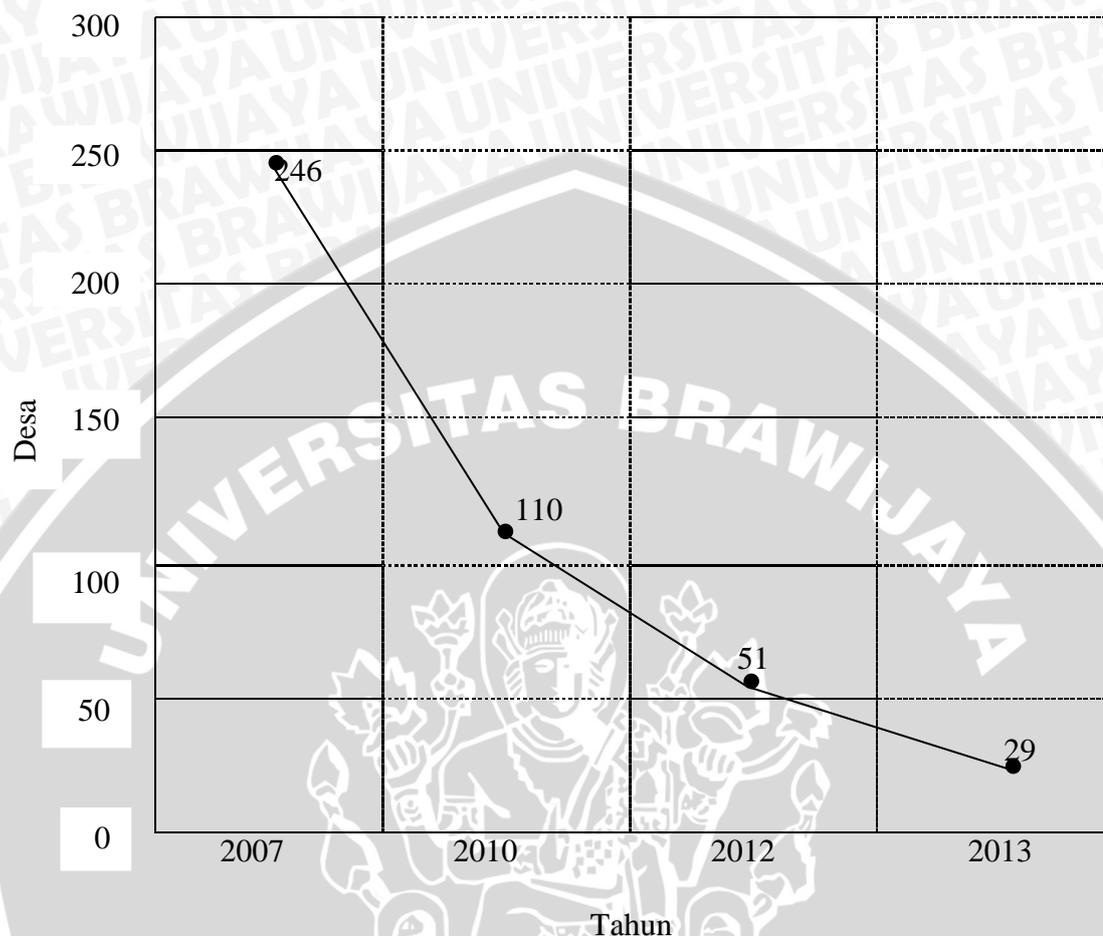
Namun pada kenyataannya, program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tidak efektif karena tersebar pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani, sehingga sering terjadi *overlapping* kegiatan di satu pihak dan terjadi kevakuman di lain pihak. Kejadian ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi dari SKPD pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, masih minimnya data penduduk miskin di Kabupaten Malang, sehingga menyebabkan sulitnya menentukan sasaran yang tepat, sehingga sering adanya orang tertentu mendapat program

dari berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan dan tak jarang orang yang seharusnya tidak berhak menerima tetapi mendapatkan bantuan dan yang seharusnya berhak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Bupati Malang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 tanggal 23 Februari 2011, tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa program Bupati Menyapa Rakyat akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Ngopi Bareng Bung Rendra (Ngobrol Pagi Bersama Bung Rendra)
- 2) Anjangsana di 33 Kecamatan dalam rangka Sosialisasi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang Periode Tahun 2010 - 2015
- 3) Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)

Salah satu kegiatan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) merupakan suatu bentuk kegiatan dimana Bupati beserta seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan pelayanan dan berbagai kegiatan di desa yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Sasaran dari Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) ini untuk memajukan desa tertinggal di Kabupaten Malang.



Sumber: Strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Malang

Gambar 1 Desa Tertinggal di Kabupaten Malang

Jumlah desa tertinggal sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 telah mengalami penurunan. Tahun 2007 jumlah desa tertinggal sebesar 246 kemudian pada tahun 2010 berkurang menjadi 110 desa dan pada tahun 2012 berkurang lagi menjadi 51 desa kemudian tahun 2013 berkurang hingga mencapai 29 desa tertinggal. Dan dalam lampiran keputusan Bupati Malang nomor: 414.56/ / KEP/421.208/2013 bahwa Kecamatan Poncokusumo memiliki 3 desa yang tergolong desa tertinggal yakni Desa Pandansari, Desa Sumpersari dan Desa Dawuhan.

Desa Pandansari termasuk desa tertinggal karena skor dari adanya penentuan kriteria Desa tertinggal dari Kementerian Negara RI Pembangunan Daerah Tertinggal hanya 34. Skor yang diperoleh Desa Pandansari tersebut berdasarkan penentuan kriteria desa tertinggal yang meliputi sarana dan prasarana di desa, infrastruktur desa, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa. Karena hal tersebut kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilaksanakan pada tanggal 27-28 Februari 2012 di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Berdasarkan pemikiran beberapa latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, serta menggali informasi tentang apa saja faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Bertitik dari persoalan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malang (Studi Terhadap Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Malang melalui kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Apa faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Malang melalui kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Disamping adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Akademik
  - a. Sebagai salah satu media dalam mengkaji ilmu di bidang kebijakan publik.
  - b. Penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan teori-teori kebijakan ke dalam praktek yang sesungguhnya.
  - c. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan masukan kepada pemerintah yang terlibat pada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Malang.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah yang terlibat pada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah

seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam menentukan langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca yang tertarik untuk menekuni profesi sebagai *public policy*.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas yang mencakup pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditinjau dari sudut akademik maupun dari sudut praktis, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diketengahkan berbagai teori serta hasil pemikiran para ahli yang menjadi landasan bagi penulis dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk membentuk pola pemikiran dan analisis yang konstruktif dan ilmiah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Didalam bab ini berisi uraian tentang teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, kemiskinan, pemberdayaan, pelayanan publik, desa tertinggal, serta program Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

### BAB III METODE PENELITIAN

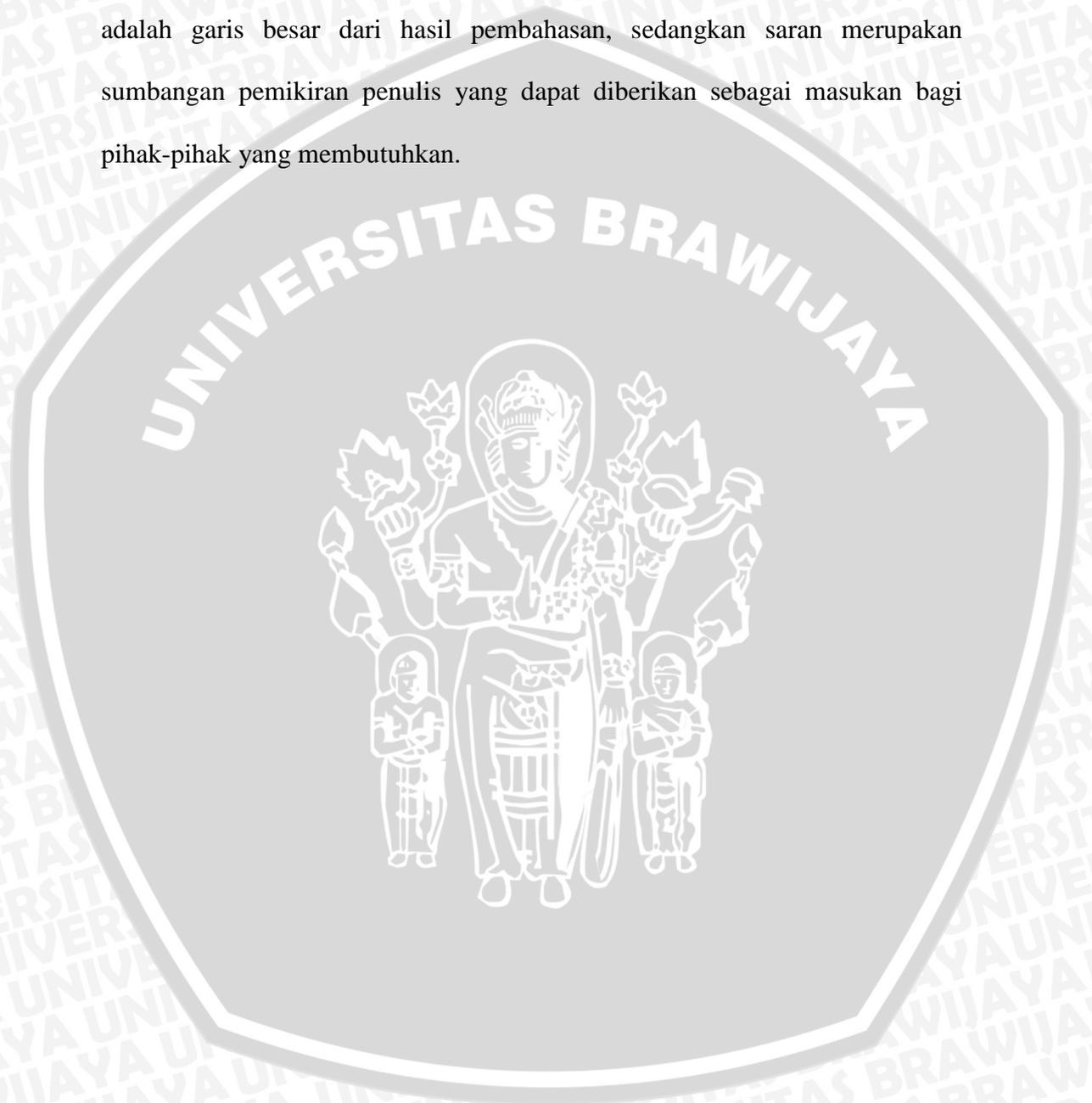
Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian antara lain gambaran umum lokasi penelitian dan data fokus penelitian, data-data dari hasil penelitian tersebut dianalisa dan diinterpretasi. Sehingga dalam bab ini akan dibahas implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang beserta faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) serta yang menjadi fokus penelitiannya yaitu di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang merupakan salah satu dari desa tertinggal di Kabupaten Malang dan telah melaksanakan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) pada 27-28 Februari 2012. Dalam bab ini juga akan disertai analisis yang mendalam terhadap kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut berdasarkan teori-teori yang berkaitan, serta diperkuat dengan informasi yang didapat langsung dari wawancara mendalam dengan pejabat publik yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan

Makna kebijakan dalam versi normal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Abdul Wahab (2012:9) memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut:

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (United Nation, 1975).

Terdapat definisi lain yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan politik Carl Friedrich yang dikutip dari Abdul Wahab (2012:9) bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Beberapa para ahli yang telah mendefinisikan konsep-konsep mengenai makna kebijakan, kemudian oleh Abdul Wahab (2012:10) ditarik sebuah pemahaman baru dalam mempelajari kebijakan, yakni:

Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau ingin dilakukannya.

Kedua, harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), di mana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan di antara sejumlah alternatif yang (dianggap) tersedia.

Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

Adanya beberapa pendapat para ahli di atas oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan atau mengurangi kerumitan masalah publik.

## 2. Tujuan Kebijakan

Menurut Sunggono (1994:12) terdapat beberapa tujuan dari adanya kebijakan antara lain:

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
- c. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
- d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

### 3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Parker dalam Abdul Wahab (2008:51), kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Definisi lain yang dikemukakan oleh pakar Inggris, W. I. Jenkins (1978:15) dalam Abdul Wahab (2012:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

*“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut)”*.

Anderson dalam islamy (1998:19) menyatakan bahwa dari pengertian kebijakan publik memiliki implikasi, diantaranya:

1. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau berorientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang akan dilakukan

4. Kebijakan publik bisa bersifat positif dan negatif. Positif berarti bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah. Negatif yang berarti keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasar pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoriter).

Adanya definisi-definisi kebijakan publik diatas oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Tahap dan Siklus Kebijakan Publik

Dalam membuat suatu kebijakan tentu harus melalui proses atau langkah-langkah yang perlu ditempuh dan dicermati agar menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam Kebijakan Publik menurut William Dunn (2001), yaitu:

- a. Penentuan agenda (*Agenda Setting*) merupakan langkah awal yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam menentukan masalah-masalah yang terjadi menjadi agenda pemerintah karena masalah tersebut menurut pemerintah sangat penting dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat yang akan dimasukkan dalam agenda pemerintah.
- b. Pendefinisian masalah (*Problem Definition*) terdiri dari Forecasting Needs dan Defining Targets yaitu meramalkan kebutuhan-kebutuhan

masyarakat atas masalah yang terjadi dan menentukan kelompok mana yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

- c. Pembuatan kebijakan (*Policy Design*), pembuatan kebijakan oleh pemerintah dengan memperhatikan tujuan kebijakan dan kelompok sasaran dalam menyelesaikan masalah atau problem yang terjadi di masyarakat.
- d. Pengabsahan kebijakan (*Policy Legitimation*), setelah pemerintah membuat kebijakan maka pemerintah terlebih dahulu melakukan survey mengenai bagaimana pendapat atau opini masyarakat terutama masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan yang pemerintah buat sebelum pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut agar pemerintah memperoleh legitimasi atau persetujuan dari masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- e. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*), setelah kebijakan dibuat dan mendapat legitimasi dari masyarakat maka langkah selanjutnya adalah pemerintah menjalankan kebijakan tersebut.
- f. Evaluasi dampak kebijakan (*Policy Impact*), setelah kebijakan diimplementasikan atau dilaksanakan maka langkah selanjutnya para pembuat kebijakan melakukan evaluasi terhadap hasil maupun dampak dari kebijakan dengan menilai apakah tujuan kebijakan telah tercapai, bagaimana dampak jangka panjang kebijakan tersebut, dan apakah telah memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi kelompok sasaran kebijakan tersebut.

g. Terminasi kebijakan (*Termination*) yaitu apakah kebijakan yang dibuat selanjutnya akan dilanjutkan atau dihentikan melalui analisa secara politik.

Berdasarkan tahap-tahap kebijakan yang telah disebutkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan dalam setiap tahap atau prosesnya memerlukan aspirasi dan partisipasi dari seluruh komponen baik pemerintah sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) maupun dari masyarakat umum yang menjadi sasaran dari kebijakan.

## **B. Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi kebijakan, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:102), lebih mengarah pada batasan dalam implementasi yang yang diinterpretasikan sebagai: tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Kamus Besar bahasa Indonesia (1999:129) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam kamus Webster secara *lexicografis* yang dikutip Abdul Wahab (2012:135), merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Selain itu pendapat Van Meter dan Van Hom (1975) dalam Abdul Wahab (2012:135), merumuskan proses implementasi sebagai:

“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Menurut Abdul Wahab (2012:133), implementasi dalam arti seluas-luasnya sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Selanjutnya Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan bahwa yang menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan yang meliputi kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama berdasarkan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

## 2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2006:141), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua model guna memahami implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan *bottom up*. Menurut Agustino (2006:140), dalam model *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya diambil dari tingkat pusat. Model *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau

birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti model *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Model *bottom up* menurut Makmur (2009:22) adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model ini melibatkan dua konteks atau lingkungan yaitu keahlian manajemen dan kultur organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik, dan lingkungan politik tempat mereka harus bekerja. Hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan merupakan faktor pendukung yang penting dalam model *bottom up*.

Sesuai dengan judul dan fokus penelitian maka penulis menggunakan model *top down*. Model *top down* yang digunakan adalah model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards. Hal ini didasarkan pada variable-variabel yang ada digunakan untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program juga karena yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan antara kedua model tersebut memiliki kemiripan sehingga dengan menggabungkan kedua model tersebut dapat diperoleh analisis lebih mendalam tentang implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) ini.

Berikut penjelasan model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn dan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards, yaitu:

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:156-172) menjelaskan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2) Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang tersedia merupakan proses implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau

dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten atau yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

#### 4) Karakteristik badan-badan pelaksana

Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

- Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
- Sumber-sumber politik suatu organisasi
- Vitalitas suatu organisasi
- Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”
- Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”

5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

6) Kecenderungan pelaksana (implementor)

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

7) Kaitan antara komponen-komponen model

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijaksanaan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Cara ini menurut Van Meter dan Van Horn, akan mampu mendeskripsikan dan membenarkan secara singkat mengenai beberapa hubungan yang dihipotesiskan sebelumnya.

#### 8) Masalah kapasitas

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Masalah kapabilitas disoroti dalam empat komponen model, yakni: sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

#### b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Winarno (2007:175-203), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

##### 1) Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung

implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

## 2) Sumber-Sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan antara lain adalah staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi mengenai program-program baik mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan maupun mengenai data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah, wewenang yang memadai mulai dari bentuk memberi bantuan sampai memaksakan perilaku, dan fasilitas-fasilitas yang layak untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang efektif.

## 3) Kecenderungan-Kecenderungan atau Tingkah Laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

#### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi.

### 3. Faktor-Faktor Kritis dalam Implementasi Kebijakan

Ada dua faktor utama dalam proses implementasi kebijakan menurut Zainal Abidin (2012:147-152), yakni faktor utama internal yang meliputi kebijakan yang diimplementasikan beserta faktor-faktor pendukung lain dan faktor utama eksternal yang meliputi kondisi lingkungan beserta pihak-pihak terkait.

#### a. Faktor Utama Internal

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi. Berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi. Faktor utama internal kedua dalam proses implementasi adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung terhadap kebijakan. Faktor ini meliputi sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, legitimasi, dan partisipasi.

b. Faktor utama eksternal

Faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan juga merupakan faktor penentu. Proses implementasi kebijakan bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional, yaitu konstitusional, kolektif, operasional, dan distribusi. Selain itu, terdapat beberapa faktor eksternal lain yang mempersulit implementasi suatu kebijakan, antara lain:

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam.
- 2) Faktor politik
- 3) Tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan.
- 4) Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor *input*.
- 5) Kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
- 6) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri.

Selain dua faktor di atas terdapat faktor lain yang dijumpai di lapangan menurut Levitt dalam Zainal (2012:154-155), yaitu:

- Faktor Teknis, antara lain berkenaan dengan:
  - 1) Kondisi teknis dari permasalahan
  - 2) Intensitas tingkat keparahan permasalahan

- 3) Tingkat penguasaan teknologi yang tersedia
  - Faktor administratif, antara lain berkaitan dengan:
    - 1) Status kebijakan
    - 2) Peralatan kebijakan yang dipakai
    - 3) Sitem administrasi dan lingkungan kerja yang ada
    - 4) Jangka waktu yang ditentukan dan yang diperlukan
  - Hubungan kerja antar organisasi atau antar instansi yamh terkait, antara lain mencakup:
    - 1) Kepentingan dari pihak-pihak yang terkait
    - 2) Peran dan kekuasaan yang ada pada masing-masing instansi
    - 3) Teknik komunikasi yang dipakai

#### 4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994:158), unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan

terjadi gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. Konsep Kemiskinan**

#### **1. Pengertian Kemiskinan**

Definisi umum mengatakan, bahwa kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada dalam suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya. Kemiskinan dalam pengertian luas dapat meliputi kemiskinan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun iman dan akhlak (Suryono, 2010:233). Definisi World Bank (1990) kemiskinan adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan

keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2007:320) kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kondisi lingkungannya.

## 2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Suryono (2010:233) membedakan kemiskinan menjadi dua jenis yakni:

### a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah seseorang atau kelompok orang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.

### b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan warga yang lain (disatu wilayah), dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya ditempat lain.

Kemiskinan relatif lebih disebabkan karena ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran pendapatan perkapita.

### 3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Dewanta (1995) dalam Suryono (2010:237) mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin, antara lain:

- a. Karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki
- b. Karena ketidak beruntungan (*lucky*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin
- c. Karena ketimpangan distribusi
- d. Karena pembangunan dianalogkan dengan ideologi (partai)
- e. Karena kesalahan strategi pembangunan dan industrialisasi
- f. Karena adanya intervensi pemerintah yang berlebihan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Universitas Brawijaya Malang (2006:38-41) dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang mengemukakan faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
- c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan
- d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan
- e. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi

- f. Terbatasnya akses terhadap air bersih
- g. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
- h. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam
- i. Lemahnya jaminan rasa aman
- j. Lemahnya partisipasi
- k. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi

Menurut Indra Maipita dalam penyebab dan dampak kemiskinan menyebutkan bahwa kemiskinan di desa disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

- a. Ketidakberdayaan

Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan

- b. Keterkucilan

Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin

c. Kemiskinan materi

Kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah

d. Kerentanan

Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin

e. Sikap

Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

( <http://www.waspada.co.id>)

4. Kriteria Kemiskinan

Menurut BPS dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Malang oleh Dr. Nehruddin, SE, MM (2013) sebagai kepala Bappeda Kabupaten Malang terdapat beberapa kriteria kemiskinan antara lain:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain

- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
  - f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
  - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
  - h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
  - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
  - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
  - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
  - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan atau pendapatan perkapita Rp 166.697 per kapita per bulan
  - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
  - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
5. Pengertian Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah

kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

#### 6. Kebijaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Suryono (2004:105) terdapat beberapa kebijaksanaan yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain:

- a. Kebijaksanaan tidak langsung, diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan
- b. Kebijaksanaan langsung, ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah
- c. Kebijaksanaan khusus, untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

## D. Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment* sedangkan memberdayakan terjemahan dari *empower*. Menurut Priyono dan Pranarka (1996) bahwa memberdayakan (*empower*) mengandung dua makna pokok, yakni: (a) *to give or authority to* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri) dan (b) *to give ability or enable* (artinya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004) memaknai pemberdayaan sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Makna hakiki pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan

- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dan pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan.

## 2. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistyani (2004:83), tahap-tahap dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar

tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

### 3. Pendekatan Pokok dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suryono (2010:262) terdapat tiga pendekatan pokok dalam upaya pemberdayaan masyarakat (miskin), yaitu:

- a. Pendekatan yang Terarah

Pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin

- b. Pendekatan Kelompok

Pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi

c. Pendekatan Pendampingan

Pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisor terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Suryono (2010:262) mengemukakan empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain:

- a. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek
- b. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif dan efisien
- c. Mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya
- d. Memaksimalkan peran pemerintah (khususnya pemerintahan kelurahan dan desa) dalam memfasilitasi dan mengatur pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## E. Pelayanan Publik

### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik terdiri atas dua unsur kata yang dapat diartikan secara terpisah. Pelayanan menurut Kotler dalam Sinambela (2006:4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik”. Sedangkan dalam mengartikan kata “Publik”, Inu, dkk dalam Sinambela (2006:5) memaknai kata “publik” sebagai “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki”.

Dalam menjelaskan makna gabungan dari dua istilah di atas, Sinambela (2006:5) yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, menurut beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya guna menjaga kepercayaan masyarakat.

### 2. Azas Pelayanan Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azas pelayanan sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam Siti Rochmach (2011:6) sebagai berikut:

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi

f. Keseimbangan Hak Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Prinsip Pelayanan Publik

Adapun prinsip pelayanan publik di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 dalam Siti Rochmach (2011:7) disebutkan bahwa

penyelenggaraan pelayanan harus dapat memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup dalam hal:

- Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
- Unit kerja/pejabat berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
- Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- Kepastian waktu

c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

f. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain lain.

## F. Desa Tertinggal

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

### 1. Kriteria Desa Tertinggal

Menurut Kementerian Negara RI Pembangunan Daerah Tertinggal dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Malang oleh Dr. Nehrudin, SE, MM (2013) sebagai kepala Bappeda Kabupaten Malang terdapat beberapa kriteria desa tertinggal diantaranya:

- a. Jalan utama desa, meliputi: jalan aspal (skor 3), diperkeras (skor 2) dan jalan tanah (skor 1)
- b. Lapangan usaha mayoritas penduduk, meliputi: usaha pertanian (skor 2) dan non pertanian (skor 4)
- c. Fasilitas pendidikan, meliputi: s/d SD (skor 2), s/d SLTP (skor 3) dan s/d SLTA (skor 4)
- d. Fasilitas kesehatan, meliputi: tidak ada fasilitas (skor 2), ada PUSYANMAS/PUSKESMAS (skor 3) dan ada fasilitas lain (skor 4)
- e. Tenaga kesehatan, meliputi: maksimal bidan (skor 1), maksimal paramedis (skor 3) dan minimal dokter (skor 4)

- f. Sarana komunikasi, meliputi: tidak ada kantor pos (skor 2), hanya ada telp umum (skor 3) dan ada kantor pos dan telp umum (skor 4)
- g. Jumlah sarana komunikasi, meliputi: < 500 (skor 1), 500-950 (skor 2) dan  $\geq 950$  (skor 3)
- h. Sumber air minum/masak penduduk, meliputi: air PAM/pompa/pompa listrik (skor 3), air sumur (skor 2) dan air hujan (skor 1)
- i. Sumber bahan bakar penduduk, meliputi: gas/listrik/minyak tanah (skor 4) dan kayu bakar (skor 2)
- j. Prosentase rumah tangga pengguna listrik, meliputi: < 35 (skor 1), 35-60 (skor 2), 60-90 (skor 3),  $\geq 90$  (skor 4)
- k. Prosentase rumah tangga pertanian, meliputi: < 65,0 (skor 4), 65,0-80,0 (skor 3), 80,0-87,5 (skor 2) dan  $> 87,5$  (skor 1)
- l. Keadaan sosial ekonomi penduduk, meliputi: sangat miskin (skor 1), miskin (skor 2) dan sangat kaya/kaya/cukup (skor 3)
- m. Kemudahan mencapai puskesmas/fasilitas kesehatan lain, meliputi: mudah (skor 4), cukup (skor 3), sulit (skor 2) dan sangat sulit (skor 1)
- n. Kemudahan ke pasar permanen, meliputi: mudah (skor 4), cukup mudah (skor 3) dan sangat sulit (skor 1)
- o. Kemudahan mencapai pertokoan, meliputi: mudah/cukup mudah (skor 3) dan sulit/sangat sulit (skor 2)

Pembobotan/skoring

Pembobotan/skoring adalah total nilai kriteria mulai dari 1) s/d 15)

- Desa dikatakan sebagai desa sangat tertinggal apabila skor 27-32

- Desa dikatakan sebagai desa tertinggal apabila skor 33-38
- Desa dikatakan sebagai desa maju apabila skor 39-45
- Desa dikatakan sebagai desa sangat maju apabila skor 46-52

#### **G. Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)**

Sesuai Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/421.013/ 2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat”, kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) merupakan suatu bentuk kegiatan dimana Bupati beserta seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan pelayanan dan berbagai kegiatan di desa yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dirancang pelaksanaannya mulai tahun 2012 dan difokuskan pada sekitar 160 Desa. Hal ini juga dirancang dengan melibatkan desa-desa terdekat di wilayah yang dituju, sehingga dengan model *clustering* tersebut akan terjangkau semua desa. Acara ini dilaksanakan sekitar 9 (sembilan) bulan dan diselingi dengan agenda Safari Ramadhan.

Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) akan dilaksanakan rutin setiap bulan di desa yang dianggap strategis, representatif dan menjangkau desa-desa di sekitarnya pada suatu kecamatan, sehingga pelayanan dapat diberikan kepada masyarakat di beberapa desa yang berdekatan. Dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa), Bupati Malang bersama para pejabat Pemerintah Kabupaten Malang mengajak staf yang terkait untuk mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Seluruh instansi yang

ada di Kabupaten Malang terlibat dan ikut serta mensukseskan pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Bung Rendra bersama elemen Pemerintah Kabupaten Malang antara lain: kegiatan olah raga bersama masyarakat setelah kedatangan, acara temu warga secara santai bersama Bung Rendra, Sholat Shubuh, dilanjutkan acara sambang warga ke rumah sekitar Masjid, olah raga, kerja bakti, berikutnya kegiatan layanan-layanan publik misalnya layanan IMB, Catatan Sipil, Perijinan, layanan kesehatan, bantuan sosial-keagamaan, bantuan bagi warga miskin dan tak kalah pentingnya adalah melakukan observasi atas kekuatan/potensi desa yang bisa dikembangkan. Melalui kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa), diharapkan dapat memberikan dampak yang sangat bagus terhadap masyarakat yaitu mempercepat eskalasi pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang.

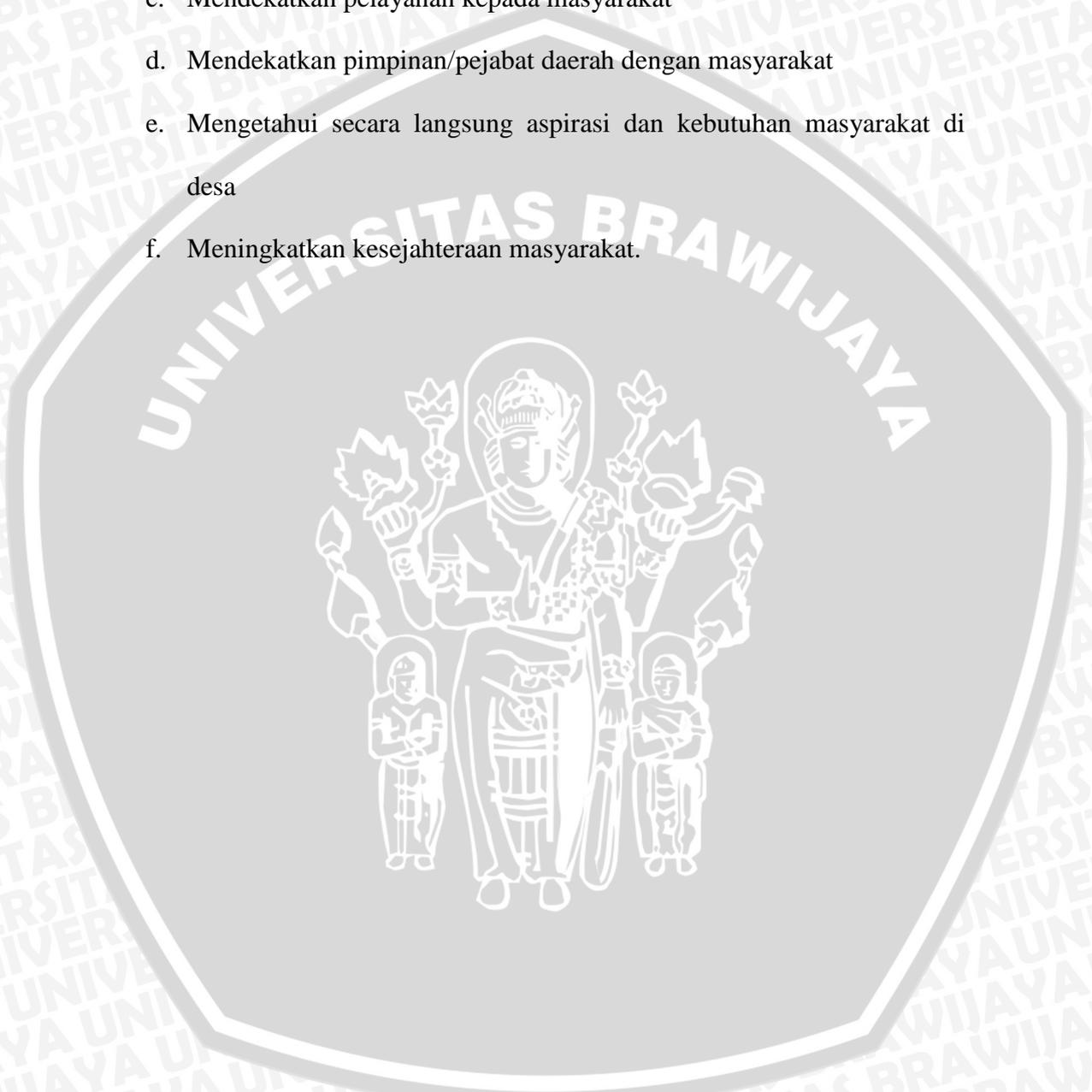
#### 1. Maksud

Maksud Kegiatan Bina Desa adalah untuk mempercepat tercapainya Visi Kabupaten Malang, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB (Mandiri, Agamis, Demokratif, Produktif, Aman, Tertib dan Berdaya Saing).

#### 2. Tujuan

- a. Membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang

- b. Mempercepat eskalasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan
- c. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- d. Mendekatkan pimpinan/pejabat daerah dengan masyarakat
- e. Mengetahui secara langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di desa
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat agar nantinya dalam pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan mudah dan memberikan hasil yang berkualitas. Metode adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis Usman dan Akbar (2008:41). Sehingga metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk melakukan pembuktian secara ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.

##### A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22). Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:1) adalah sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Moleong, (2007:6) adalah sebagai berikut:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penulis dapat menyimpulkan dari pendapat di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangatlah penting dan diperlukan untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal yang diluar permasalahan. Menurut Moleong (2007:94), penentuan fokus penelitian memiliki tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang dibahas oleh peneliti
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data/informasi apa yang akan dikumpulkan, dan data/informasi mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah:

1. Implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)

- a. Pelaksanaan pembangunan di level desa melalui kerja bakti bersama masyarakat setempat maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD.
  - b. Kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di desa.
  - c. Kegiatan menjaring aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
2. Faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, adalah:
- a. Faktor Internal  
Yaitu faktor dari dalam organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, meliputi kondisi kebijakan, sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, dan partisipasi.
  - b. Faktor Eksternal  
Yaitu faktor dari luar organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, meliputi faktor cuaca dan faktor lokasi.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti melakukan penelitian yang mana dapat mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Lokasi yang akan dijadikan penelitian disini adalah Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Sedangkan yang menjadi situs penelitiannya antara lain:

1. Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
2. Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pemilihan lokasi dan situs penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam akses informasi. Alasan lain karena Desa Pandansari merupakan desa awal yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) yakni pada tanggal 27-28 Februari 2012, sehingga akan lebih dapat diketahui hasil dari pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Selain itu, juga karena pertimbangan bahwa dampak pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) belum banyak memberikan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang penting dan menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data.

Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai peneliti di lapangan, selanjutnya adalah data tambahan seperti data-data tertulis. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang dipilih oleh peneliti untuk mencari informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang berada di lingkungan tempat penelitian. Adapun yang menjadi subyek data primer adalah:

- a. Pak Edi Harianto sebagai Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- b. Pak Supendi sebagai anggota Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- c. Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari dan Pak Prihadi Saputra sebagai Walikelas 6 SDN 1 Pandansari
- d. Bu Suharti selaku Bidan Desa di Desa Pandasari dan Bu Supiati selaku kader Posyandu Mawar Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

- e. Pak Soleh selaku Ketua Kelompok Tani, Pak Kasiono selaku ketua Kelompok Peternakan, Bu Sherly selaku anggota PKK Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- f. Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber-sumber yang relevan, dimana tujuannya adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari internet, dokumen, arsip, perpustakaan, peraturan atau undang-undang dan laporan-laporan penelitian terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar, artikel, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya daftar kegiatan, data tentang bantuan-bantuan, keputusan-keputusan Bupati Kabupaten Malang yang diperoleh dari Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai sekretaris pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Menurut Burhan Bungin (2001:142) observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam hal ini mengenai implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

## 2. Wawancara

Menurut Moh. Nazir yang dikutip Burhan Bungin (2001:133) wawancara atau yang biasa disebut interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer tentang implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Wawancara tersebut dilakukan dengan:

- a. Pak Edi Harianto sebagai Perangkat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- b. Pak Supendi sebagai anggota Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

- c. Bu Dra. Sutjasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari dan Pak Prihadi Saputra sebagai Walikelas 6 SDN 1 Pandansari
- d. Bu Suharti selaku Bidan Desa di Desa Pandasari dan Bu Supiati selaku kader Posyandu Mawar Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- e. Pak Soleh selaku Ketua Kelompok Tani, Pak Kasiono selaku ketua Kelompok Peternakan, Bu Sherly selaku anggota PKK Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
- f. Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Keberadaan dokumen disini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumen dapat berupa data-data tertulis, dokumen-dokumen, laporan-laporan resmi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah atau arsip-arsip pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga memiliki kedudukan yang strategis di dalam proses kegiatan penelitian yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data

(Arikunto, 2009: 134). Instrumen penelitian dapat dikatakan merupakan alat dan teknik yang digunakan sebagai referensi untuk mengumpulkan data. Guna menunjang hal tersebut maka instrumen penelitian yang digunakan haruslah tepat dan dapat dipercaya. Mengingat tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan suatu program pembangunan, maka instrumen yang dipergunakan adalah:

1. Peneliti sendiri

Di dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen penelitian yang paling utama dan mendasar. Hal tersebut dikarenakan, peneliti memiliki peran sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, dan menjadi pelapor hasil kegiatan penelitiannya (Moleong, 2004: 168). Di dalam melakukan suatu pengamatan, secara langsung peneliti menggunakan panca indera untuk melihat, mendengar, serta merasakan fenomena yang ada disekitarnya, terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman wawancara atau *interview guide*

Pedoman wawancara atau *interview guide* merupakan suatu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti untuk melakukan pengumpulan data, hal ini berfungsi agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian.

3. Catatan lapangan atau *field note*

Catatan lapangan atau *field note* merupakan buku catatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk

mencatat hasil wawancara maupun pengamatan yang berisi tentang informasi dan data-data yang ada di lapangan terkait dengan penelitian.

### G. Metode Analisis

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:280) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Analisis data pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian dan penyelidikan terhadap suatu hasil pengamatan atau pengukuran yang dikumpulkan, sesuai dengan kebutuhan. Disini analisis data menyangkut pengarahannya empiris ke dalam suatu bentuk yang dapat diinterpretasikan sehingga dapat memberikan kejelasan sebagai jawaban atas pengujian dan pemecahan masalah.

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Milles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2001:110) adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyutungan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data

dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

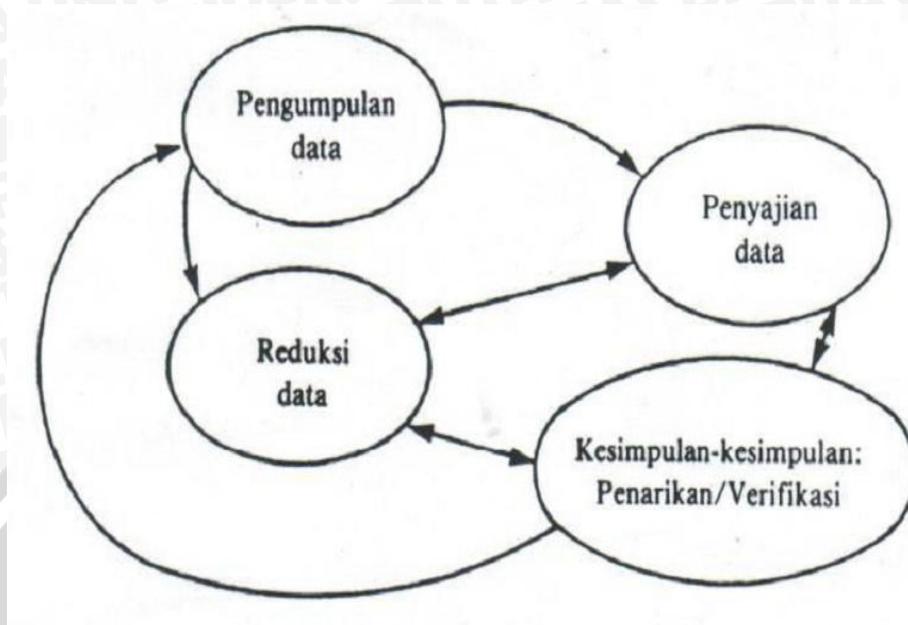
## 2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelomponya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap model analisis data Milles dan Huberman dapat digambarkan dengan alur skema sebagai berikut:



Sumber: Milles dan Huberman.

Gambar 2 Alur Skema Analisis Data (*Interactive Model*)

Pada gambar tersebut terlihat adanya satu rangkaian yang terdapat dalam tiga kegiatan yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Penyajian data selain berasal dari data hasil reduksi, perlu dipastikan bahwa pada proses pengumpulan data tidak ada hal penting yang tertinggal. Demikian juga di dalam verifikasi data, apabila terjadi kesalahan karena belum dapat disepakati kebenaran maknanya, maka harus kembali dalam proses pengumpulan data, karena verifikasi data merupakan hal yang sangat penting di dalam membuat kesimpulan secara tepat (Usman dan Akbar, 2008: 88).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data Umum

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km<sup>2</sup> atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90" sampai 112°57'00" Bujur Timur, 7°44'55,11" sampai 8°26'35,45" Lintang Selatan. Dan memiliki batas wilayah:

Utara: Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto

Timur: Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang

Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Selatan: Samudra Indonesia

#### **b. Kecamatan Poncokusumo**

Kecamatan Poncokusumo sebagai salah satu dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yang terletak  $\pm 24$  Km sebelah timur dari ibukota/ pusat pemerintahan Kabupaten Malang dan terbagi atas 17 desa, serta ketinggian wilayah Kecamatan Poncokusumo dari permukaan laut antara 600 sampai dengan 1200 m dengan suhu rata-rata  $21,7^{\circ}\text{C}$ , sedangkan curah hujan rata-rata antara 2300 mm/tahun sampai 2500 mm/tahun.

Secara geografis Kecamatan Poncokusumo merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang cenderung berbukit-bukit karena berada disebelah barat lereng gunung semeru sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan lahan produktif.

Batas-batas wilayah Kecamatan Poncokusumo adalah:

Utara: Kecamatan Tumpang

Timur: Kabupaten Lumajang

Selatan: Kecamatan Tajinan

Barat: Kecamatan Wajak

Jumlah penduduk di Kecamatan Poncokusumo:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Poncokusumo

NO	NAMA DESA	LUAS (KM <sup>2</sup> )	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1	Poncokusumo	6	3271	3106	6377	660
2	Karangnongko	6	3907	4088	7995	1206
3	Jambesari	5	3479	3425	6904	1300
4	Sumberejo	8	3231	3185	6416	668
5	Wonomulyo	1	2660	2628	5288	2785
6	Gubugklakah	3	1889	1838	3727	1010
7	Ngadas	4	945	900	1845	407
8	Ngebruk	5	2183	2197	4380	803
9	Belung	3	3249	3211	6460	1820
10	Karanganyar	5	4126	4049	8175	1341
11	Dawuhan	10	3760	3735	7495	660
12	Ngadireso	6	1831	1832	3663	589
13	Pandansari	9	3812	3622	7434	729
14	Wonorejo	6	2270	2148	4418	655
15	Wringinanom	9	2956	2731	5687	561
16	Pajaran	4	3616	3809	7425	1335
17	Argosuko	3	2253	2305	4558	1226
Jumlah Penduduk adalah 98247 jiwa						

Sumber : [http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page\\_id=46](http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page_id=46)

### c. Desa Pandansari

Secara geografis Desa Pandansari terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dalam Desa Pandansari terdapat 3 (tiga) dusun, adapun dusun tersebut yakni: Krajan Pandansari, Dusun Wonosari, dan Dusun Sukosari yang terbagi atas 59 Rukun Tetangga (RT) dan 18 Rukun Warga (RW). Desa Pandansari memiliki jarak 8 Km dari Kecamatan Poncokusumo dan 28 Km dengan ibukota/Kabupaten Malang sedangkan luas wilayah 951 Ha, terdiri dari :

- Tegal / ladang : 592 Ha
- Sawah : 4 Ha

- Pemukiman Penduduk : 121 Ha
  - Pekarangan : 27 Ha
  - Perumahan : 94 Ha
- Hutan lindung : 217 Ha
- Fasilitas umum : 5 Ha
- Lain – lain : 8 Ha

**Batas-batas wilayah Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo:**

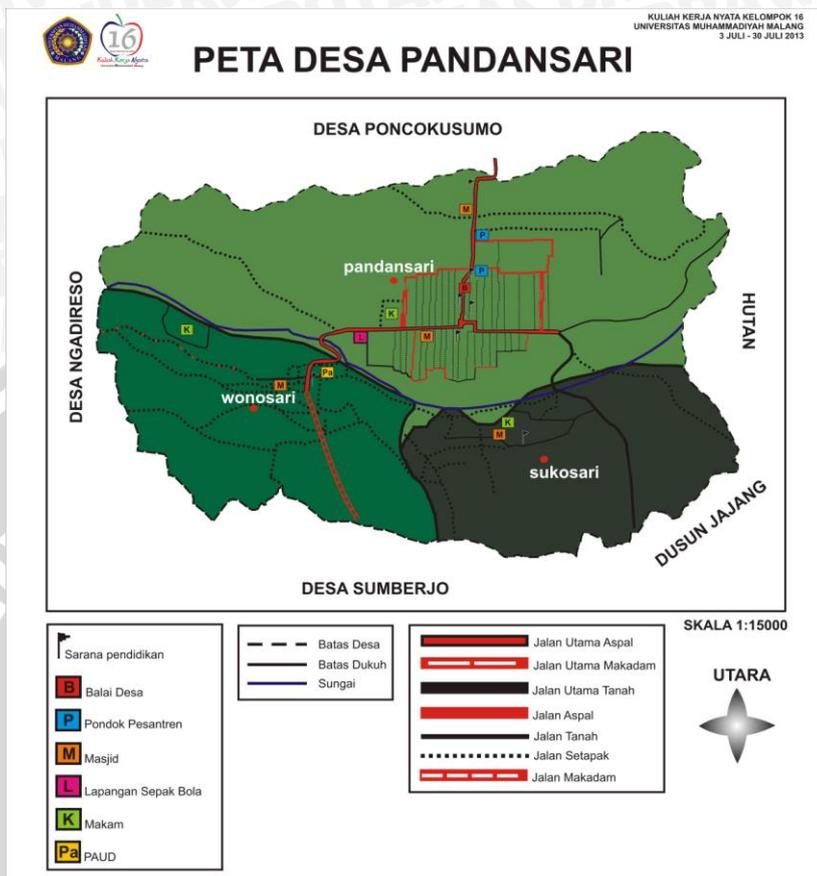
- Sebelah Utara : Desa Poncokusumo
- Sebelah Timur : Perhutani
- Sebelah Selatan : Desa Sumberejo
- Sebelah Barat : Desa Ngadireso

**Iklim Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo:**

- Tinggi tempat dari permukaan laut : 850 – 1000 M
- Suhu rata-rata : 18 – 22 0 C
- Curah hujan rata-rata : 2000 – 3000 Mm
- Jumlah bulan hujan : 6 bulan
- Bentang wilayah : Berbukit

**Komunikasi Desa Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo:**

- Jarak Desa dengan Kecamatan : 8 Km
- Jarak Desa dengan Ibukota Kabupaten : 28 Km
- Jarak Desa dengan Ibukota Propinsi : 130 Km



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 3 Peta Desa Pandansari

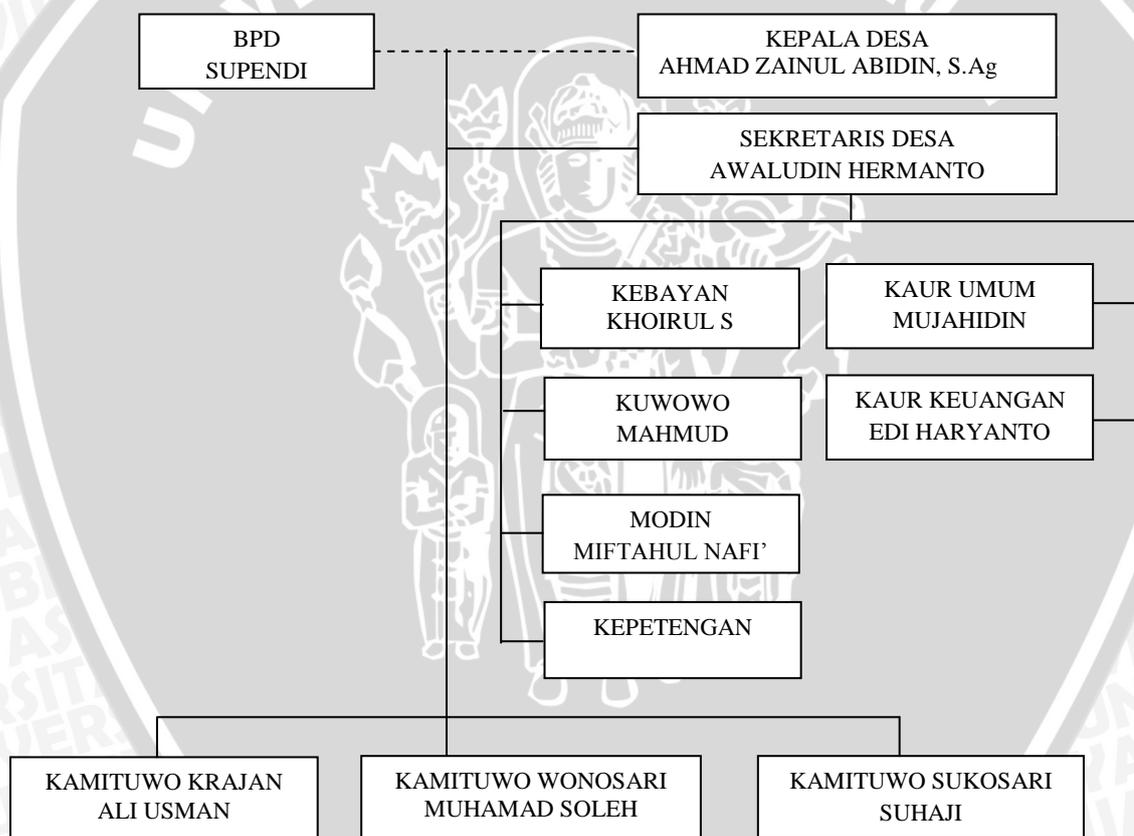
Desa Pandansari dihuni oleh 2025 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 7434 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki 3812 Jiwa dan penduduk perempuan 3622 Jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Pandansari adalah:

- KK Petani : 848 KK
  - Petani apel : 537 KK
  - Petani tebu : 153 KK
  - Lain-lain : 158 KK
- KK Buruh tani : 1042 KK
- Pedagang : 135 KK

Pendidikan Masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo

- Tidak sekolah : 762 Orang
- Lulus SD : 3752 Orang
- Lulus SLTP : 676 Orang
- Lulus SLTA : 152 Orang
- Sarjana : 51 Orang

Berikut merupakan struktur pemerintah Desa Pandansari



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang  
 Gambar 4 Struktur Pemerintahan Desa Pandansari

Keterangan:

Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -



## 2. Gambaran Umum Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat, terdapat 3 bentuk kegiatan dalam program “Bupati Menyapa Rakyat” yaitu:

1. Ngopi Bareng Bung Rendra (Ngobrol Pagi Bersama Bung Rendra)
2. Anjongsana 33 Kecamatan
3. Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

Adanya kegiatan-kegiatan dalam program ini diharapkan secara umum dapat menjadi evaluasi dan menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Malang serta dapat bermanfaat untuk mengukur efektifitas dan efisiensi kebijakan publik yang telah dibuat.

Tujuan diadakannya program “Bupati Menyapa Rakyat” antara lain:

1. Menjaring aspirasi publik bagi proses pembangunan di Kabupaten Malang
2. Melakukan dialog/ngobrol pagi secara substansi antara pemimpin (Bupati) didampingi SKPD terkait dengan seluruh elemen masyarakat
3. Mensosialisasikan program/kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan publik di Kabupaten Malang
4. Mendorong dan memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya

5. Meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang
6. Mengukur kadar keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang
7. Penguatan akses layanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

Berikut uraian kegiatan dalam program “Bupati Menyapa Rakyat”:

1. Talk Show melalui “Ngopi Bareng dengan Bung Rendra”

Kegiatan ini dirancang sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi, sosialisasi sekaligus sarana dialog warga dengan Bupati Malang untuk lebih mendekatkan dan menguatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang yang responsif dan transparan. Acara ini dikemas dalam *Talk Show* bersama Radio Republik Indonesia (RRI) yang melibatkan unsur pemerintahan di Kabupaten Malang sesuai tematik/permasalahan yang dikupas, sekaligus “on-air.” Oleh karenanya masyarakat dapat langsung menyampaikan hal-hal/permasalahan dengan tema disampaikan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat tiap bulan mulai pukul 06.00–07.00 WIB.

Tujuan:

- a. Menjaring permasalahan dan proses solusinya dengan pihak terkait

- b. Menjaring aspirasi publik tentang pembangunan di Kabupaten Malang
  - c. Menjembatani aspirasi publik ke lembaga yang tepat di Pemerintah Kabupaten Malang
  - d. Mensosialisasikan program-program yang sudah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang
  - e. Mengukur kadar keberhasilan program yang sudah dijalankan melalui publik
  - f. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Anjangsana di 33 Kecamatan

Dalam upaya mensosialisasikan visi dan misi Bung Rendra, maka kegiatan ini dilakukan dengan melakukan *road show* ke 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang secara bergiliran. Tujuan utamanya adalah mempertemukan stakeholder di level kecamatan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Upaya ini sejalan dimana sosialisasi visi dan misi tersebut diharapkan akan menjadi pilar bagi rencana pembangunan Kabupaten Malang 5 tahun ke depan.

Tujuan:

- a. Mensosialisasikan visi dan misi serta program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang ke level Kecamatan (RPJM-D)

- b. Menjaring aspirasi publik di tingkat Kecamatan
  - c. Mempertemukan warga dan SKPD terkait secara langsung dalam program-program/kegiatan yang dicakup dalam mendukung pencapaian visi dan misi
  - d. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)

Karakteristik desa-desa di Kabupaten Malang yang sangat beragam dengan jumlah 378 desa, menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin daerah untuk mampu mendorong bagi percepatan pembangunan sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat desa sebagai basis wilayah di Kabupaten Malang. Kegiatan ini dirancang pada tahun kedua atau tahun 2012. Kegiatan ini difokuskan pada sekitar 160 desa. Hal ini juga dirancang dengan melibatkan desa-desa terdekat di wilayah yang dituju, sehingga dengan model *clustering* tersebut akan terjangkau semua desa. Acara ini sekitar 9 bulan dan diselengi dengan agenda Safari Ramadhan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Bupati Malang bersama elemen Pemerintah Kabupaten Malang antara lain: kegiatan olahraga bersama masyarakat setelah kedatangan, acara temu warga secara santai bersama Bung Rendra, Sholat Subuh, dilanjutkan acara sambang warga ke rumah sekitar masjid, olahraga, kerja bakti, berikutnya kegiatan layanan-layanan publik misalnya layanan IMB, catatan sipil, perizinan, layanan kesehatan, bantuan sosial, keagamaan, bantuan bagi warga

miskin dan melakukan observasi atas kekuatan/potensi desa yang bisa berkembang.

Tujuan:

- a. Menyokong pelaksanaan pembangunan di level desa melalui kerja bakti maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD
- b. Melakukan kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di desa
- c. Mengukur kadar keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Malang
- d. Menjaring aspirasi publik di tingkat desa
- e. Melakukan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat setempat
- f. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.

Berikut merupakan susunan panitia Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/ /KEP/421.013/2012 tentang Panitia Kegiatan Bina Desa Kabupaten Malang Tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel 2 Susunan Panitia Kegiatan Bina Desa Kabupaten Malang

No.	Jabatan dalam Panitia	Keterangan
1.	Pelindung	Bupati Malang
2.	Penasehat	Wakil Bupati Malang
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
6.	Anggota	
	a. Seksi Umum dan Acara	1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang
		3. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
		4. Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
		5. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
	b. Seksi Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
	c. Seksi Agama	Kepala Bagian Bina Mental dan Kerohanian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
	d. Seksi Publikasi	Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
	e. Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
	f. Seksi Pembangunan	1. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
		2. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang

		3. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang
	g. Seksi Pelayanan Masyarakat	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
		2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang
		3. Sekretaris UPT Perijinan Kabupaten Malang
	h. Seksi Keamanan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) termasuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun hasil/*outcome* yang diperoleh meningkatnya kapasitas masyarakat dan peran sertanya dalam membangun desa. Pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka menjangkau aspirasi secara langsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Malang serta meningkatkan komunikasi antar elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang, dengan berbagai kegiatan antara lain, dialog langsung Bupati Malang dengan masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, pembangunan fisik, kerja bakti, penghijauan serta pemberian bantuan dengan melibatkan seluruh SKPD, lembaga teknis lainnya di daerah dan organisasi kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelayanan publik seperti melibatkan peran media, FKUB, pelayanan kepolisian (SIM).

Alasan mengapa kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilaksanakan di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo, karena Desa

Pandansari merupakan salah satu desa dengan klasifikasi “Desa Tertinggal,” skore: 34, dengan letak geografi dan topografi termasuk pada lereng perbukitan, jarak kantor Desa ke Kecamatan 8 KM, jalan aspal dengan kerusakan di beberapa bagian, mata pencaharian penduduk rata-rata sebagai buruh tani, hanya ada Sekolah Dasar, penduduk lebih banyak menggunakan bahan bakar kayu, antara 35-60% penduduk sudah menggunakan listrik untuk penerangan.

Pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 sampai hari selasa 28 Februari 2012. Berikut merupakan acara kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari, hasil dari wawancara dengan Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“semua SKPD datang dan langsung absen di balai desa kemudian diantar oleh perwakilan desa ke tempat penginapan (*Home Stay*) yang telah disediakan pihak desa. Setelah istirahat dan sholat Ashar, dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola antara Tim Bupati dan Kepala SKPD melawan Tim Masyarakat Kecamatan Poncokusumo. Kemudian istirahat untuk makan malam dan sholat magrib dan dilanjutkan acara dialog dan hiburan yang diawali dengan seserahan bantuan oleh Bupati secara simbolis hingga pukul 12 malam. Pada hari kedua, setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan sambang warga dengan pemberian bantuan langsung oleh Bupati kepada masyarakat miskin. Kemudian talk show bersama RRI dengan tema infrastruktur dilanjutkan dengan senam bersama dan makan pagi di balai desa setelah itu pemberian pelayanan dan kerja bakti hingga jam 2.” (wawancara pada hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada program Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)**

#### **a. Pelaksanaan pembangunan di level Desa melalui kerja bakti bersama masyarakat setempat maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD**

Pengimplementasian program Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo, Pemerintah Kabupaten Malang beserta satuan kerjanya (SKPD) melaksanakan pembangunan di level desa melalui kerja bakti bersama masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur desa serta pemberian bantuan-bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan dua tahap, yakni sebelum dan saat kegiatan berlangsung. Adapun program dan kegiatan dari pelaksanaan program SKPD yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di level desa dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari yakni:

- 1) Program kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 3 Petugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dra. Panjtaningsih, SR	Kepala KP3A	Narasumber
	Ida Sari Wardani	Kasi Lindung	Pelaksana Kegiatan dan Pembawa Acara
	Erni Kusri	Staf	Akomodasi
	Ajeng Swastika K.	Staf	Notulen

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) berjumlah 4 orang. Koordinasi dalam kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) kepada sekolah untuk mempersiapkan tempat untuk sosialisasi dan murid-murid yang menerima PMT-AS.

Table 4 Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) sebanyak 790 Siswa/ Siswi di 4 (empat) SD/MI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa siswi 4 (empat) lembaga SD/MI di Desa Pandansari sebanyak 790 siswa.</li> <li>- Wali Murid, Kepala Guru BP, SD/MI, Pengurus PKK Desa Pandansari, Perangkat Desa Pandansari sebanyak 50 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan program PMT-AS</li> <li>- Sosialisasi pemenuhan nutrisi dan Gizi bagi anak sekolah.</li> <li>- Pengisian kuisioner tentang pola makan bersih dan sehat.</li> </ul>

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pelayanan berupa Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) kepada 790 murid di 4 (empat) SD/MI. Jumlah siswa/siswi yang mengikuti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) ini di SDN 2

Pandansari sebesar 323 murid, di SDN 1 Pandansari sebesar 147 murid dan sisanya MI Al Hidayah, dan SD Islam Sukosari. Makanan yang diberikan setiap sekolah berbeda-beda tergantung masing-masing sekolah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari dan Pak Prihadi Saputra sebagai Walikelas 6 SDN 1 Pandansari, sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) di SDN 2 Pandansari. Pada saat itu jumlah murid kami yang mengikuti kegiatan tersebut sebesar 323 murid. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) ini diberikan berupa kacang hijau dengan tujuan pemenuhan nutrisi dan Gizi bagi anak sekolah” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)

“Jumlah murid dari SDN 1 Pandansari saat Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat kegiatan Bina Desa sebanyak 147 murid. Makanan yang diberikan berupa susu real good dan kue-kue basah seperti ressoles, pastel, weci, lumpur” (wawancara pada hari hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Pak Prihadi Saputra)

Tabel 5 Bantuan Kantor Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Alat Memasak	4 Paket alat memasak : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 panci ukuran</li> <li>• Gelas 790 buah</li> <li>• 4 kompor</li> <li>• 4 selang</li> <li>• 4 regulator</li> <li>• 4 Tabung Gas Elpiji</li> </ul>	SDN Pandansari 1 SDN Pandansari 2 MI Al-Hidayah SD Islam Sukosari

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan berupa peralatan memasak kepada masing-masing sekolah untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS), sehingga diharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 10 kali/tiap tahun pelajaran. Akan tetapi, di SDN 1 Pandansari kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) ini diberikan selama 1 bulan yaitu 2 kali seminggu. Seperti yang diungkapkan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari dan Pak Prihadi Saputra sebagai Walikelas 6 SDN 1 Pandansari, sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa, Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak itu memberikan bantuan berupa peralatan memasak juga untuk Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) seperti kompor, tabung Elpiji beserta selang regulatornya, panci, gelas plastik. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) ini akan diberikan 10 kali/tiap tahun pelajaran, yaitu tiap jam 06.30 atau sebelum pelajaran dimulai” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)

“Bantuan yang diberikan Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak berupa peralatan masak seperti kompor, panci, 6 lusin gelas plastik, tabung Elpiji beserta selang regulatornya. Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS) ini diberikan hanya sebulan yaitu seminggu 2 kali dengan 2 kue tiap murid” (wawancara pada hari hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Pak Prihadi Saputra)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 5 Pemberian PMT-AS oleh Pak Bupati

- 2) Program kegiatan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 6 Kegiatan Dinas Pendidikan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Pendidikan	Pembinaan PAUD	1 lembaga	Melakukan pembinaan edukatif & manajemen pengelolaan kelembagaan
	Pembinaan persiapan ujian nasional bagi orang tua / wali murid	orang tua murid	orang tua/ wali murid dikumpulkan untuk menerima informasi & penjelasan tentang persiapan & langkah yang harus dilakukan agar putra-putrinya berhasil dalam mengikuti ujian nasional

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dari Dinas Pendidikan adalah pembinaan PAUD dan Pembinaan persiapan ujian nasional bagi orang tua/wali murid. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari, sebagai berikut:

“Saat Kegiatan Bina Desa berlangsung Dinas Pendidikan mengadakan pembinaan kepada PAUD di Desa Pandansari dan pembinaan kepada wali murid dalam persiapan ujian nasional ” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 6 Pelaksanaan pembinaan kepada wali murid

Tabel 7 Bantuan Dinas Pendidikan

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Pendidikan	Bantuan sepeda untuk siswa dari keluarga miskin	10 buah sepeda	1.3 (tiga) orang siswa SDN 1 Pandansari 2.5 (lima) orang siswa SDN 2 Pandansari 3.2 (dua) orang siswa SDI Al Hidayah Pandansari

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan berupa 10 buah sepeda kepada siswa dari keluarga miskin. Sepeda tersebut diberikan kepada 3 (tiga) orang siswa SDN 1

Pandansari, 5 (lima) orang siswa SDN 2 Pandansari, dan 2 (dua) orang siswa SDI Al Hidayah Pandansari. Berikut merupakan hasil petikan wawancara dengan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari, yaitu:

“Saat kegiatan Bina Desa berlangsung Dinas Pendidikan memberikan bantuan berupa sepeda yang diberikan kepada siswa dari keluarga miskin. Di sekolah kami ada 5 siswa yang menerima bantuan tersebut” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 7 Penyerahan sepeda kepada siswa kurang mampu

- 3) Program kegiatan Badan Diklat dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 8 Kegiatan Badan Diklat

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Badan Diklat	Out Bound	Kelas IV & V	Out Bound berkolaborasi dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Perpustakaan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Permainan Game dan Penyerahan Hadiah.

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan oleh Badan Diklat berupa kegiatan Out Bound yang dilaksanakan bersama SKPD lain, yaitu dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Perpustakaan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN 2 Pandansari dengan peserta dari siswa/siswi kelas IV dan V. Lebih lanjut Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari mengungkapkan:

“Badan Diklat saat Bina Desa mengadakan Out Bound di SDN 2 Pandansari dengan peserta dari murid kelas IV dan V. Kegiatannya saat itu seperti kegiatan pramuka, permainan-permainan (hulahup, menara-menaraan, main bola, dll) serta pembagian hadiah-hadiah” (wawancara pada

hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)

Tabel 9 Bantuan dari Badan Diklat

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Badan Diklat	Bola Voli	1 buah	SDN Pandansari II
	Bola Sepak	1 buah	SDN Pandansari II
	Bola Tolak Peluru	2 buah (1 kg & 2 kg)	SDN Pandansari II
	Raket	1 set	SDN Pandansari II

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Badan Diklat juga memberikan bantuan peralatan olahraga berupa 1 buah bola voli, 1 buah bola sepak, 2 buah bola tolak peluru, dan 1 set raket. Peralatan olahraga ini diberikan kepada SDN 2 Pandansari sebagai tempat kegiatan Out Bound. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari, sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa berlangsung sekolah kami menerima bantuan dari Badan Diklat berupa peralatan olahraga yang berupa bola sepak, bola voli, bola tolak peluru dan raket” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 8 Penyerahan peralatan olahraga oleh Pak Bupati

- 4) Program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 10 Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	M. Tohari	PTPK. Kec. Poncokusumo	Koodinator
	Ir. Wiratna Kusuma	Kabid	Ketua Tim
	Carlos Kusnindar, S.Pt	Kasi	Wakil Ketua Tim
	Sapto waluyo	Kasi	Anggota
	Drs. Aris Wahtudi	Kasi	Anggota
	Sugeng Widodo, S.Pt	Kasi	Anggota

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor yang terlibat dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo berjumlah 6 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan pihak PTPK Kecamatan Poncokusumo terlebih dahulu mengkoordinasikan kepada Kelompok Peternakan di Desa Pandansari dan saat berlangsungnya kegiatan pihak dari Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan dengan dibantu oleh Kelompok Peternakan.

Tabel 11 Kegiatan dan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	Pelaksanaan Minum Susu & Makan Telur	Siswa Sekolah ( 500 Siswa)	1. Pengumpulan Siswa 2. Pelaksanaan Minum Susu & Makan Telur
	Pelaksanaan Iseminasi Buatan	Peternakan Sapi Potong & Kambing	1. Pengumpulan Ternak 2. Pelaksana IB
	Pelaksanaan PKB & ATR (Pemeriksaan Kebuntingan & Gangguan Reproduksi Ternak)	Peternak Sapi Potong	1. Pengumpulan Ternak 2. Pelaksanaan PKB-ATR
	Pelayanan Kesehatan Ternak	Peternak Sapi Potong	1. Pengumpulan Ternak 2. Pelayanan Kesehatan

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa pelaksanaan minum susu dan makan telur, pelaksanaan Iseminasi Buatan (IB), pelaksanaan PKB & ATR (Pemeriksaan Kebuntingan & Gangguan Reproduksi Ternak), dan pelayanan kesehatan ternak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertempat di sekolah-sekolah untuk kegiatan minum susu dan makan telur dan untuk kegiatan yang berhubungan dengan ternak di tempatkan Dusun Wonosari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari dan Pak Kasiono selaku ketua Kelompok Peternakan Desa Pandansari, sebagai berikut:

“Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat Bina Desa mengadakan kegiatan minum susu dan makan telur kepada siswa/siswi SDN 2 Pandansari untuk menambah pemenuhan nutrisi dan Gizi bagi anak sekolah” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)

“Saat Bina Desa berlangsung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengadakan kegiatan di Dusun Wonosari yang tepatnya di depan SDN 1 Pandansari. Kegiatannya itu ada Iseminasi Buatan (IB), PKB dan ATR (Pemeriksaan Kebuntingan dan Gangguan Reproduksi Ternak), dan pelayanan kesehatan ternak” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Pak Kasiono)

Tabel 12 Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bibit ikan lele	100 ekor	Pak Carik Hermanto dan Pak Mudin Miftahul

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memberikan bantuan berupa 100 ekor bibit ikan lele. Bibit ikan lele tersebut diletakkan di rumah Pak Carik Hermanto dan Pak Mudin Miftahul. Akan tetapi, karena tidak cocok dengan lokasi dan air di Desa Pandansari maka ikan lele tersebut banyak yang mati. Berikut hasil wawancara dengan Perangkat Desa Pandansari Pak Hermanto, sebagai berikut:

“Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat kegiatan Bina Desa memberikan bantuan 100 ekor bibit ikan lele. Tetapi ikan lele banyak yang mati soalnya gak cocok disini untuk budidaya ikan lele karena airnya disini pakai PDAM” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 9 Penyerahan bibit ikan lele oleh Pak Bupati

- 5) Program kegiatan Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 13 Petugas Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	Dra. Martatik	Kabid Akuisisi & Pengolahan	Koordinator Kegiatan
	Drs. Sutrisno	Sekretaris	Koordinator Sekretaris
	Drs. Maskur Zaidi	Staf	Menangani Surat Masuk & Keluar
	Dra. Dewi Kartikawati,	Kasubid	Memberikan Layanan

	M.Si	Pengembangan	MPK & Informasi Perpustakaan
	Drs. Atsalis Supriyanto, M.Si	Kasubid Pengelohan & Pengelolaan	Memberikan Bimtek Pengelolaan Buku
	Junaidi, S.Ag	Kasubid Akuisisi	Memberikan Bimtek Pengelolaan Buku
	Drs. Poernomo Hari S.	Kasubid Pemeliharaan & Pengendalian Dokumen	Mendokumentasikan Kegiatan Bina desa & Produk unggulan desa
	Nurhadi, S.Sos, MM	Kasubid Pengumpulan & Pengelolaan Arsip	Pembinaan Arsip Desa
	Erwin Soebiantoro, A.Md	Arsiparis Penyelia	Pembinaan Arsip Desa

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo dari Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi berjumlah 9 orang.

Tabel 14 Kegiatan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Pelayanan mobil perpustakaan keliling (MPK)	Sekolah & Masyarakat Umum	Memberikan Layanan MP memberikan informasi perpustakaan kepada masyarakat
	Surat Menyurat	Masyarakat Desa	Mengagendakan surat masuk & surat keluar mendistribusi surat mengarsip surat
	Pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA)	Sekolah dan masyarakat	Memberikan layanan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)
	Bimbingan Pengolahan Buku	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	Memberikan Bimtek pengelolaan buku kepada Petugas Pengelola Perpustakaan Desa
	Pendokumentasian	Masyarakat Desa & Unggulan Masyarakat	Mendokumentasikan kegiatan Bina Desa & produk unggulan Desa
	Pembinaan Arsip Desa	Perangkat Desa	Memberikan pembinaan tentang surat masuk, keluar, penataan & penyimpanan serta penemuan kembali arsip

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yaitu pelayanan mobil perpustakaan keliling (MPK), pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA), pembinaan arsip desa. Kegiatan dari Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ini difokuskan pada lebih kepada sekolah-sekolah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Prihadi Saputra sebagai Walikelas 6 SDN 1 Pandansari dan Pak Edi Harianto sebagai Perangkat Desa Pandansari, sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa berlangsung, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mengadakan kegiatan pelayanan di SDN 1 Pandansari berupa pelayanan mobil perpustakaan keliling (MPK) dan pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA). Murid-murid antusias dengan kedatangan mobil perpustakaan keliling (MPK) tersebut. Akan tetapi, dalam pelayanan Kartu Tanda Anggota (KTA) masih kurang peminatnya” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Pak Prihadi Saputra)

“Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi saat kegiatan Bina Desa mengadakan kegiatan pembinaan kearsipan desa untuk perangkat desa Pandansari yaitu memberikan pembinaan tentang surat masuk, keluar, penataan & penyimpanan serta penemuan kembali arsip. Akan tetapi, pembinaan tersebut hanya berlangsung singkat karena terbatasnya waktu” (wawancara pada hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

- 6) Program kegiatan Badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 15 Kegiatan Badan Lingkungan Hidup

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Badan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Murid-murid sekolah	Jam 09.00 WIB Sosialisasi di SDN Pandansari 2
	Gathering Family	Murid IV & V	Jam 09.00 WIB bersama dengan Badan Diklat

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan oleh Badan Lingkungan Hidup adalah Sosialisasi Sekolah yang Berwawasan Lingkungan dan Gathering Family. Kegiatan Badan Lingkungan Hidup difokuskan di SDN 2 Pandansari. Berikut merupakan hasil petikan wawancara dengan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari, yaitu:

“Badan Lingkungan Hidup di sekolah kami saat kegiatan Bina Desa berlangsung mengadakan acara berupa Gathering Family bersama Badan Diklat dengan peserta dari murid kelas V dan IV SDN 2 Pandansari dan Sosialisasi Sekolah yang Berwawasan Lingkungan” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)

Tabel 16 Bantuan Badan Lingkungan Hidup

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Badan Lingkungan Hidup	Bibit Glodokan Lokal	10 Pohon	SDN Pandansari 1 & 2
	Tong Sampah	15 Buah	SDN Pandansari 1 & 2, SD MI
	Komporter	3 Buah	SDN Pandansari 1 & 2, SD MI

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, Badan Lingkungan Hidup saat kegiatan bina desa juga memberikan bantuan berupa Bibit Glodokan Lokal, Tong Sampah, dan Komporter. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bu Dra. Sutjiasri Istiani sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Pandansari, sebagai berikut:

“Saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa, Badan Lingkungan Hidup memberikan bantuan berupa Bibit Glodokan Lokal, Tong Sampah, dan Komporter” (wawancara pada hari jumat, 13 Desember 2013 di rumah Bu Dra. Sutjiasri Istiani)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 10 Penyerahan bantuan dari Badan Lingkungan Hidup

- 7) Program kegiatan Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 17 Petugas Dinas Bina Marga

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Dinas Bina Marga	Ir. Agus Sugianto	Kepala Bidang Bina Teknik	Pembinaan bidang Infrastruktur kebinamargaan
	Ir. Burhanudin, MSi	Kepala Bidang Fasilitas Jalan	Pembinaan bidang Infrastruktur kebinamargaan
	Ir. Miftoni Efendi, MT	Kepala Bidang Peningkatan / Pembangunan	Pembinaan bidang Infrastruktur kebinamargaan
	M. Yekti Pracoyo, ST	Kepala Bidang Pemeliharaan	Pembinaan bidang Infrastruktur kebinamargaan

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor yang terlibat dalam kegiatan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo berjumlah 4 orang. Kegiatan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dengan dibantu warga masyarakat untuk perbaikan jalan.

Tabel 18 Bantuan Dinas Bina Marga

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Bina Marga	Pembangunan Jalan	1000 x 3 meter	Panitia Pembangunan Jalan Desa Pandansari

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan dari Dinas Bina Marga adalah pembangunan jalan utama desa Pandansari mulai dari jalan masuk desa sampai dusun Wonosari sepanjang 3 km. hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Pandansari Pak Edi Harianto, sebagai berikut:

“Dinas Bina Marga melaksanakan pembangunan jalan 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan Bina Desa dengan menembel lubang-lubang sepanjang jalan utama masuk desa Pandansari sampai dusun Wonosari. Beberapa bulan kemudian Dinas Bina Marga membangun jalan dengan melebarkan dan makadan tembusan dari Dusun Wonosari ke Sumberejo” (wawancara pada hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

- 8) Program kegiatan Dinas Pengairan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 19 Bantuan dari Dinas Pengairan

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Pengairan	Kawat Brojong	40 Lembar	Desa Pandansari

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan oleh Dinas Pengairan yaitu berupa kawat bronjong yang dipasang di sungai Dusun Sukosari. Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa Pak Edi Harianto, sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa Dinas Pengairan memberikan bantuan berupa kawat brojong. Awalnya kawat tersebut dipasang di depan balai desa kemudian dipindah ke sungai di Dusun Sukosari” (wawancara pada hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

- 9) Program kegiatan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 20 Petugas Dinas Kehutanan

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Dinas Kehutanan	Ir. Tri Wahyuning Tyas	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan bibit untuk Penyerahan Kepada Masyarakat dan Penanaman /Penghijauan Kanan Kiri Jalan Serta Melaksanakan Kegiatan Penghijauan</li> <li>- Mempersiapkan Blanko SKAU dan Pelayanan SKAU</li> </ul>
	Ir. Atok Irianto, M.Si	Kabid PTGH	
	Endang Eny Purbandari	Plh. Kabid PK	
	Wagimin	Kasi RLT-KT	
	Ir. Joni Suhartono, MM	Kasi Penatagunaan Hutan	

	Agus Sutrisno, S.Sos	Kabid PH	
	Diah Wahyuning Prastiwi	Kasi Produksi Iuran Kehutanan	
	Slamet, SP	Ka.UPTD Tumpang	- Penyuluhan TUK Kepada Masyarakat
	Isnanto, SP	Staf UPTD Tumpang	

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo oleh Dinas Kehutanan berjumlah 9 orang. Koordinasi dilakukan yaitu dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten bertugas mempersiapkan bibit serta melaksanakan kegiatan penghijauan dan pelayanan SKAU sedangkan dari UPTD Tumpang bertugas untuk sosialisasi TUK kepada masyarakat.

Tabel 21 Kegiatan dan Pelayanan Dinas Kehutanan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Kehutanan	Penghijauan (500 Pohon)	Kanan Kiri Jalan Masuk Ds.Pandansari Sepanjang ± 2,5 km	Desa Pandansari
	Distribusi Blanko SKAU	Kades	Pendistribusian Blanko SKAU Sesuai Kelengkapan
	Pelayanan SKAU	Masyarakat	Penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Kayu Bulat Yang Berasal Dari Hutan Hak/ Milik

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan oleh Dinas Kehutanan adalah penanaman pohon kanan kiri jalan masuk desa Pandansari selain itu juga di jalan Dusun Sukosari. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Pak Soleh selaku Ketua kelompok tani desa pandansari dan Bu Sumini sebagai istri Kepala Dusun Sukosari, sebagai berikut:

“Dinas Kehutanan saat kegiatan Bina Desa memberikan bantuan berupa pohon mahoni dan cemara yang ditanam di kanan kiri jalan masuk Desa Pandansari sampai Dusun

Wonosari” (wawancara pada hari selasa, 31 Desember 2013 di rumah Pak Soleh)

“Saat kegiatan Bina Desa Dinas Kehutanan melaksanakan penghijauan di kanan kira jalan Dusun Sukosari dengan menanam pohon suren dan sengon” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Bu Sumini)

- 10) Program kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 22 Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jamban Keluarga (1 Unit)</li> <li>- Biogas Plastik ( 1 Unit)</li> <li>- Pelestarian (5 lokasi)</li> <li>- Fasilitasi /Diskusi penguatan kelembagaan Pengelolaan Air</li> <li>- Bersih Pedesaan/Pengelilaan Santitasi Lingkungan (H-1)</li> </ul>		

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan oleh Dinas Cipta Karya & Tata Ruang meliputi pembangunan jamban keluarga, biogas plastik, pelaksanaan bersih pedesaan/pengelilaan santitasi

lingkungan. Lebih lanjut diungkapkan oleh Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari, sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa Dinas Cipta Karya & Tata Ruang melakukan pembangunan jamban keluarga pada rumah Pak Munip juga ada pembuatan biogas plastik yang ditempatkan di rumah Pak Marsali. Selain itu, sehari sebelum pelaksanaan kegiatan bina desa warga melaksanakan kerja bakti di balai desa serta jalan-jalan desa yang akan dilalui Pak Bupati” (wawancara pada hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

11) Program kegiatan PDAM dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 23 Kegiatan dari PDAM

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
PDAM	Pemasangan SR baru	20 SR	Biaya Pasang baru SR sebesar Rp. 500.000,- ( dari tarif Normal Rp. 800.000,-)

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pembangunan dari PDAM adalah pemasangan SR baru sebanyak 20 SR dengan biaya pasang baru SR sebesar Rp. 500.000 dari tarif Normal Rp. 800.000. Hal ini

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari, sebagai berikut:

“Saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa dari pihak PDAM memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memasang SR baru kepada 20 keluarga yang diberikan kepada 8 masyarakat Dusun Wonosari dan lainnya kepada masyarakat desa Pandansari dengan harga yang lumayan murah yaitu Rp. 500.000” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

**b. Kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di desa**

Dalam implementasi program Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari, Pemerintah Kabupaten Malang beserta satuan kerjanya (SKPD). Kegiatan pelayanan publik dan sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD terkait secara teknis berlangsung selama 20 jam. Dengan adanya pemberian layanan dan sosialisasi langsung ke tempat yang membutuhkan pemerintah Kabupaten Malang berharap pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Adapun program dan kegiatan dari pelaksanaan program SKPD yang terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari yakni:

- 1) Program kegiatan UPT Perijinan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 24 Kegiatan dan Pelayanan UPT Perijinan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
UPT Perijinan	Sosialisasi & Pelayanan Keliling UPT Perijinan Jenis Ijin : - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Izin Gangguan (HO) - Trayek - Peternakan - Surat Izin Usaha Perdagangan - Dll	Warga Masyarakat Kecamatan Poncokusumo Pengusaha dll	Sosialisasi & Pemberian Leaflet/Brosur Pelayanan Perijinan dalam bentuk pengambilan berkas persyaratan perijinan

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan oleh UPT Perijinan adalah sosialisasi dan pelayanan keliling UPT Perijinan. Sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh UPT Perijinan meliputi jenis ijin antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), trayek, peternakan, surat izin usaha perdagangan. Lebih lanjut diungkapkan oleh Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“UPT Perijinan saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa di Desa Pandansari melakukan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan perijinan sekaligus membagikan brosur. Selain itu juga memberikan pelayanan perijinan dalam bentuk pengambilan berkas persyaratan perijinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), trayek, peternakan, surat izin usaha perdagangan” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

- 2) Program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 25 Kegiatan dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kelahiran Pelayanan KK Pelayanan KTP	Masyarakat wilayah Kecamatan Poncokusumo	Pelayanan Akta Kelahiran Pelayanan KK Pelayanan KTP  dilaksanakan dengan koordianasi antara tim dan petugas kecamatan setempat

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan akta kelahiran, pelayanan KK, dan pelayanan KTP. Pelayanan

yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan koordianasi antara tim dan petugas kecamatan setempat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa di Desa Pandansari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan seperti pelayanan akta kelahiran, pelayanan KK, dan pelayanan KTP. Warga hanya dipungut biaya sebesar Rp 5000 untuk biaya administrasi dan akan jadi 1 bulan kemudian” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

- 3) Program kegiatan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 26 Kegiatan dan Pelayanan Dinas Kesehatan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Kesehatan	ANC dan Klas ibu hamil	10 Bumil	
	Vitamin A dan Posyandu Balita	Balita	- Pemberian Vitamin A oleh Bapak Bupati Malang - Penyuluhan, penimbangan, imunisasi
	Pelayanan masyarakat miskin	200 Maskin	Kupon 200 Oleh Polindes
	Sikat gigi, cuci tangan bersama (UKS)	5 Siswa SD Kelas III, IV dan V	Penyuluhan sebelum hari H oleh petugas UKS
	Posyandu	Lansia	Penimbangan,

	Lansia		pemeriksaan, penyuluhan, dan pemberian makanan
--	--------	--	---

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan oleh Dinas Kesehatan meliputi ANC dan kelas ibu hamil, pemberian vitamin A serta Posyandu untuk balita dan lansia, pelayanan masyarakat miskin, sikat gigi, cuci tangan bersama (UKS). Kegiatan dari Dinas Kesehatan terbagi di 2 tempat yakni di desa Pandansari untuk kegiatan ANC dan kelas ibu hamil, pelayanan masyarakat miskin, sikat gigi, cuci tangan bersama (UKS) dan kegiatan lain dilakukan di Dusun Wonosari yang bertempat di Posyandu Mawar. Lebih lanjut diungkapkan oleh Bu Suharti selaku Bidan Desa di desa Pandansari sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa, kegiatan Dinas Kesehatan di desa Pandansari antara lain ANC dan kelas ibu hamil seperti senam ibu hamil yang bertempat di SDN 2 Pandansari, ada sikat gigi dan cuci tangan bersama murid-murid dari SDN 2 Pandansari yang dipandu drg. Leli, juga ada pengobatan gratis untuk masyarakat miskin yang diikuti oleh sekitar 200 orang dengan sistem undangan dan untuk penimbangan balita serta pelayanan untuk lansia bertempat di Posyandu Mawar di Dusun Wonosari” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Bu Suharti)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 11 Pelayanan masyarakat miskin



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 12 Pelaksanaan sikat gigi bersama

Tabel 27 Bantuan Dinas Kesehatan

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Kesehatan	Timbangan	Satu	Polindes Pandansari
	Microloa	Satu	Polindes Pandansari
	Sikat Gigi, Odol, Sabun dan Door Price	1 Box	Siswa SD
	Perlengkapan bayi	1 Box	Ibu Hamil di Kelas Ibu Hamil
	Biskuit	5000	Balita Posyandu

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa dari pihak Dinas Kesehatan memberikan bantuan berupa sikat gigi, odol, sabun dan door price, timbangan, microloa, perlengkapan bayi dan biskuit. Berikut hasil wawancara dengan Bu Supiati selaku kader Posyandu Mawar dan Bu Suharti selaku Bidan Desa di Desa Pandasari sebagai berikut:

“Ada beberapa bantuan yang diberikan Dinas Kesehatan saat kegiatan Bina Desa antara lain sikat gigi, odol, sabun dan door price yang diberikan kepada murid-murid SDN 2 Pandansari, perlengkapan bayi diberikan ibu-ibu hamil di Desa Pandansari. Bantuan yang lain diberikan di Posyandu di Dusun Wonosari” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Bu Suharti)

“Dinas Kesehatan saat kegiatan Bina Desa memberikan bantuan berupa timbangan, microloa, biskuit untuk balita dan BMT Posyandu (susu dan kacang hijau)” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Bu Supiati)

- 4) Program kegiatan Badan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 28 Kegiatan dan Pelayanan Badan Keluarga Berencana

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Badan Keluarga Bencana	Pelayanan KB (IUD dan Implant)	PUS(Pasangan Usia Subur), Ibu pasca melahirkan dan pasca keguguran	Bertempat di rumah P. Seger
	Penyuluhan/ Konseling KB	Kader KB Desa Pandansari	

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dari Badan Keluarga Bencana adalah Pelayanan KB (IUD dan Implant) serta Penyuluhan/ Konseling KB untuk kader KB di Desa Pandansari. Kegiatan dari Badan Keluarga Bencana bertempat di rumah P. Seger. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bu Suharti selaku Bidan Desa di desa Pandansari sebagai berikut:

“Badan Keluarga Bencana saat kegiatan Bina Desa memberikan pelayanan KB kepada PUS (Pasangan Usia Subur), Ibu pasca melahirkan dan pasca keguguran serta penyuluhan atau konseling untuk kader KB di Desa” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Bu Suharti)

Tabel 29 Bantuan Badan Keluarga Bencana

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Badan Keluarga Berencana	BKB Kit	1 Set	Kader Posyandu Mawar Desa Pandansari Ketua : Bu. Supiati

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, Badan Keluarga Berencana juga memberikan bantuan berupa 1 set BKB (Bina Keluarga Balita) yang diberikan kepada Kelompok Mawar Desa Pandansari. Lebih lanjut diungkapkan oleh Bu Supiati selaku Kader Posyandu Mawar di desa Pandansari sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa, Badan Keluarga Berencana memberikan bantuan berupa BKB Kit atau APE (Alat Permainan Edukatif) untuk balita” (wawancara pada hari senin, 20 Januari 2014 di rumah Bu Supiati)

- 5) Program kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 30 Petugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluh	Ir. Hari Prasodjo	Kasubid Pengembangan Program Penyuluhan	Koordinator

	Suharto, SP	Kasubid Pembinaan Kelembagaan & SDM	Anggota
	Ir. Priyo Gunawan	Kasubid Ketersediaan & Distribusi Pangan	Anggota
	Drs. Doddy Priambodo	Kasubid Konsumsi & Penganekaraga man Pangan	Anggota

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor yang terlibat dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo dari Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluh berjumlah 4 orang.

Tabel 31 Kegiatan dan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Demo pembuatan sari apel dan olahan krisan	50 orang	1. Kegiatan Dilaksanakan Tanggal 28 – 2 – 2012 Jam.09.00 WIB. Dirumah Pengurus Kelompok Tani 2. Narasumber Dari Penyuluh Kecamatan Poncokusumo

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Demo pembuatan sari apel dan olahan krisan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Februari 2012 jam 09.00 WIB yang bertempat di rumah Pengurus Kelompok Tani. Lebih lanjut diungkapkan oleh Pak Soleh selaku Ketua Kelompok Tani di desa Pandansari sebagai berikut:

“Kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan saat Bina Desa adalah demo pengelolaan krisan untuk menjadi sirup dan pembuatan sari apel. Namun, kegiatan tersebut tidak dilanjutkan karena residu primer dari krisan sangat beresiko dan untuk pembuatan sari apel tidak maksimal terutama dalam pemasaran produk” (wawancara pada hari selasa, 31 Desember 2013 di rumah Pak Soleh)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 13 Demo pembuatan olahan dari krisan

- 6) Program kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 32 Petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Dinas Pertanian & Perkebunan	Ir. Purwanto, MM	Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan	Ketua
	Ir. Dwita Nirmala, M. Agr	Sekretaris	Sekretaris
	Indah Ratnawati	Kasubag Keuangan	Sie Akomodasi & Konsumsi
	Ir. Ajunuddin	Kabid Pengolahan & Pemasaran Hasil	Sie Pameran & Praktek
	Hery Yulianto, SP	Kasie Tanaman Semusim	Sie Perlengkapan
	Ir. Menil Wahyu N	Kabid Tanaman Perkebunan	Sie Pengarahan

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Table 33 Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Pertanian dan Perkebunan	Penyuluhan pertanian serta budidaya krisan dan perempesan kakao	Petani Desa Pandansari	Bertempat di rumah ketua Kelompok Tani Sido Mukti Madani

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah berkaitan dengan penyuluhan pertanian serta budidaya krisan dan perempesan kakao. Penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan bertempat di rumah ketua Kelompok Tani Sido Mukti Madani. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Pak Soleh selaku Ketua Kelompok Tani di desa Pandansari:

“Saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa, Dinas Pertanian dan Perkebunan memberikan penyuluhan kepada petani-petani di Desa Pandansari serta cara budidaya krisan dan perempesan kakao yang benar. (wawancara pada hari selasa, 31 Desember 2013 di rumah Pak Soleh)

- 7) Program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 34 Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

SKPD	Nama	Jabatan	Tugas
Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar	Dr. H. Rudianto, MA	Kepala Dians	Koordinator dan Penanggung jawab
	Drs. Ninuk Handayaningsih	Sekretaris	Penyiapan akomodasi
	Drs. Agus Satriyo	Kabid Industri Pertanian dan Kehutanan	Pelayanan IUI/TDI

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Aktor yang terlibat dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar berjumlah 3 orang.

Tabel 35 Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar	Pelatihan pembuatan makanan olahan dari singkong dan krisan	PKK Desa Pandansari	Pelatihan membuat makanan olahan dari singkong dan krisan, serta penyerahan alat kepada peserta pelatihan
	Penjualan minyak goreng murah	Warga/ Masyarakat	Penjualan langsung kepada masyarakat ( $\pm$ 500 orang)
	Penyuluhan Perijinan (TDP, TDI, IUI, Bedak, Los, Toko)	Warga/ Masyarakat	Penyuluhan Persyaratan Perijinan (TDP, TDI, IUI, Bedak, Los, Toko)

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar meliputi pelatihan pembuatan makanan olahan dari singkong dan krisan serta penyerahan alat kepada peserta pelatihan dari ibu-ibu PKK Desa Pandansari. Lebih lanjut diungkapkan oleh Bu Sherly selaku anggota ibu PKK desa Pandansari sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa, kami diberi pelatihan pembuatan kue bolu dari bahan baku singkong, membuat puding dari krisan, membuat tewul instan. Juga ada kegiatan bazar untuk hasil olahan desa dan penjualan minyak goreng murah. Ada penyuluhan perizinan juga” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di rumah Bu Sherly)



Sumber: Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Gambar 14 Pelatihan pembuatan kue

Tabel 36 Bantuan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar	Alat membuat roti	Alat membuat roti: 1. Oven 2. Mixer 3. Blender 4. Timbangan kue 5. Bahan	PKK Desa Pandansari

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar juga memberikan bantuan berupa peralatan memasak kepada PKK Desa Pandansari. Peralatan memasak tersebut untuk membuat kue berupa oven, mixer, blender, timbangan kue serta bahan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bu Sherly selaku anggota PKK Desa Pandansari sebagai berikut:

“Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar memberikan bantuan 1 set alat membuat kue seperti oven, mixer, blender, timbangan serta bahan-bahannya” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di rumah Bu Sherly)

- 8) Program kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 37 Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Dinas Koperasi dan UMKM	Sosialisasi tentang administrasi koperasi	Kop/Kopwan Desa Pandansari/ Desa Sekitar Kecamatan Poncokusumo	
	Sosialisasi penggunaan alat membuat krupuk dan alat membuat tahu	PKK Desa Pandansari	
	Pelatihan membuat es cream jamur	PKK Desa Pandansari	

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Implementasi program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UMKM meliputi sosialisasi tentang administrasi koperasi, sosialisasi penggunaan alat membuat krupuk dan tahu, serta pelatihan pembuatan es cream dari jamur.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bu Sherly selaku anggota PKK Desa Pandansari sebagai berikut:

“Dinas Koperasi dan UMKM saat kegiatan Bina Desa melakukan kegiatan sosialisasi tentang administrasi koperasi, sosialisasi penggunaan alat membuat krupuk dan tahu, serta pelatihan pembuatan es cream dari jamur” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di rumah Bu Sherly)

Tabel 38 Bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM

SKPD	Jenis Bantuan	Volume	Penerima
Dinas Koperasi dan UMKM	Alat membuat krupuk	1 set alat membuat krupuk	PKK Desa Pandansari
	Alat membuat tahu dan bahan	1 set alat membuat tahu serta bahan	PKK Desa Pandansari (Dusun Wonosari)

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Selain itu, saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan berupa 1 set alat membuat krupuk dan 1 set alat membuat tahu. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bu Sherly selaku anggota PKK Desa Pandansari sebagai berikut:

“Saat kegiatan Bina Desa, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan bantuan 1 set alat membuat krupuk dan 1 set alat membuat tahu. Akan tetapi, untuk alat pembuat tahu diserahkan di Dusun Wonosari” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di rumah Bu Sherly)

- 9) Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari

Tabel 39 Kegiatan dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

SKPD	Jenis Kegiatan/ Pelayanan	Sasaran	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Bimbingan teknis kepada anggota Satuan Pelindung Masyarakat	Anggota Satuan Linmas Desa Pandansari	Pemateri: Satpol PP dan Linmas UPT Kebakaran Dinas CKTR PMI Kab Malang Polsek Poncokusumo Koramil Poncokusumo

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo terkait dengan pelayanan dan penyuluhan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yaitu bimbingan teknis kepada Satuan Pelindung Masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan oleh Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat saat kegiatan Bina Desa di Desa Pandansari melakukan bimbingan teknis kepada Anggota Satuan Linmas Desa Pandansari dengan pemateri Satpol PP dan Linmas, UPT Kebakaran, Dinas CKTR, PMI Kab Malang, serta Polsek Poncokusumo dan Koramil Poncokusumo” (wawancara

pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

**c. Kegiatan menjaring aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa**

Penjaringan aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu tujuan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Selain itu, tujuan lainnya adalah agar masyarakat dapat mengerti kesulitan di pemerintahan. Berikut merupakan pernyataan Bupati Malang saat dialog bersama masyarakat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Dengan berkantor di desa, dan pelayanan yang diadakan, serta dalam dialog ini pula kami juga ingin tahu secara langsung keinginan masyarakat, selain itu kami juga berharap sebaliknya, masyarakat tahu dengan kesulitan kami di pemerintahan sehingga bisa terjalin saling pengertian”(Siaran Pers, Humas Kabupaten Malang)

Penjaringan aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat di Desa Pandansari dilaksanakan pada malam hari di hari pertama pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di halaman Balai Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dalam penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Pandansari melibatkan masyarakat desa dan Bupati serta SKPD Kabupaten Malang.

Pada saat yang bersamaan hari kedua pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa), tanggal 28 Februari 2012 juga merupakan jadwal Bupati untuk kegiatan *talk show* melalui “Ngopi Bareng dengan Bung Rendra” sehingga kegiatan yang biasanya dilaksanakan di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang maka untuk saat itu kegiatan tersebut dilaksanakan di balai desa Pandansari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh SKPD Kabupaten Malang serta seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan masyarakat desa yang ingin menyaksikan secara langsung *talk show* yang biasanya hanya dapat didengarkan lewat radio. Tema yang diangkat tentang infrastruktur atau prasarana kebinamargaan.

Walaupun acara *talk show* berlangsung selama 1 jam dan pagi hari yaitu 06.00 – 07.00 namun masyarakat sangat antusias mengikut acara *talk show* tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya 20 pertanyaan baik melalui telepon, sms ataupun dialog secara langsung. Pertanyaan yang ada ada yang langsung dijawab ada yang tunda karena waktu yang singkat. Namun pertanyaan yang belum terjawab akan tetap dijawab dilain kesempatan.

Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Desa Pandansari menyampaikan aspirasinya dalam 2 hal yakni mengenai:

### 1) Infrastruktur

Masyarakat menginginkan agar infrastruktur di Desa Pandansari diperbaiki. Perbaikan infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan jalan desa terutama di gang-gang desa agar diperkeras atau dicor juga agar diberikan penerangan untuk jalan-jalan desa dan di gang-gang untuk memberikan kenyamanan masyarakat Desa Pandansari. Selain itu, masyarakat meminta untuk dibangun sekolah tingkat SMA di Desa Pandansari karena akses untuk ke sekolah setingkat SMA jauh dan juga kurangnya kendaraan umum yang melintasi Desa Pandansari.

### 2) Ekonomi Desa

Desa Pandansari merupakan desa tertinggal sehingga selain masalah infrastruktur maka hal penting lain yang harus diperbaiki adalah ekonomi masyarakat. Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Pandansari adalah sebagai buruh tani. Oleh karena itu, masyarakat ingin dibangun mata pencaharian lain yaitu ingin diberi modal untuk berternak. Masyarakat telah mempunyai inisiatif untuk membuat kelompok usaha bersama yang bergerak dibidang perternakan kambing boer. Akan tetapi harga kambing boer yang mahal dan sulit mendapatkannya menyebabkan masyarakat kesulitan untuk berternak.

**2. Faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, adalah:**

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik yang menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Berikut merupakan faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang:

**a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dari dalam organisasi. Faktor internal dalam pelaksanaan kegiatan bina desa di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo meliputi:

**1) Kondisi kebijakan**

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi. Kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 tanggal 23 Februari 2011, tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat.

## 2) Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung terhadap kebijakan.

Faktor ini meliputi

### a) Sumber daya manusia

Pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) melibatkan SKPD Kabupaten Malang sebagai subjek kegiatan dan masyarakat Desa Pandansari sebagai obyek kegiatan. Lebih lanjut disampaikan oleh Pak Supendi selaku BPD Desa Pandansari sebagai berikut:

“Pelaksana kegiatan Bina Desa cukup baik. Walaupun dengan persiapan yang sangat minim tapi SKPD yang terlibat memberikan pelayanan yang baik” (wawancara pada hari hari Jumat, 13 Desember 2013 di rumah Pak Supendi)

### b) Keuangan

Dana yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) berasal dari masing-masing SKPD pelaksana sedangkan Desa Pandansari sebagai obyek kegiatan memerlukan dana untuk akomodasi keamanan saat kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Lebih lanjut disampaikan dalam hasil dari wawancara dengan Pak Supendi selaku BPD Desa Pandansari sebagai berikut:

“Pendanaan pelaksanaan kegiatan Bina Desa untuk bantuan dan pelayanan berasal dari SKPD yang terlibat dan di desa kami menyiapkan dana untuk akomodasi keamanan saja saat kegiatan Bina Desa” (wawancara

pada hari hari Jumat, 13 Desember 2013 di rumah Pak Supendi)

c) Logistik

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui SKPD yang ada sangat banyak. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten rata-rata berupa santunan kepada masyarakat miskin berupa uang atau sembako. Selain itu, bantuan juga berupa pembangunan infrastruktur desa dan kebutuhan untuk murid sekolah. Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Bantuan saat kegiatan Bina Desa itu kebanyakan berupa santunan-santunan untuk keluarga miskin juga bantuan untuk anak sekolah sama pembangunan jalan, bedah rumah” (wawancara pada hari hari Kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

d) Informasi

Penyampaian adanya pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari dilakukan melalui koordinasi dari pihak kabupaten kepada kecamatan kemudian kecamatan menyampaikan kepada pihak desa dan melalui RT/RW pihak desa menyampaikan pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) kepada masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Pak Supendi selaku BPD Desa Pandansari sebagai berikut:

“Desa telah diberi tahu 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan Bina Desa. Koordinasinya melalui kabupaten kepada kecamatan lalu kecamatan kepada desa dan melalui RT/RW desa menyampaikan pelaksanaan Bina Desa kepada masyarakat Desa Pandansari” (wawancara pada hari hari Jumat, 13 Desember 2013 di rumah Pak Supendi)

e) Partisipasi

Sambutan masyarakat Desa Pandansari saat pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) sangat antusias. Selain karena dapat langsung bertemu dan berjabat tangan dengan Bupati beserta SKPD juga karena banyaknya pelayanan, bantuan, dan hiburan yang diberikan saat pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Masyarakat sangat antusias saat pelaksanaan Bina Desa tersebut. Ini mungkin karena banyaknya pelayanan, bantuan, hiburan, terus juga karena Pak Bupati dan rombongan yang datang ke desa kita soalnya jarang-jarang ada orang penting yang ke desa kami” (wawancara pada hari hari Kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

**b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal dalam implementasi kebijakan juga merupakan faktor penentu. Terdapat 2 faktor eksternal yang mempersulit implementasi suatu kebijakan, antara lain:

a) Cuaca

Kondisi cuaca di Desa Pandansari pada pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) adalah hujan. Akan tetapi, kegiatan tetap berlangsung dengan lancar karena kegiatan dilaksanakan dalam ruang ruang yaitu di *homestay* masing-masing SKPD. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Pak Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Cuaca saat kegiatan Bina Desa di Desa Pandansari hujan di sore sampai malam hari tapi saat pagi cuaca cerah. Tetapi keadaan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan Bina Desa karena kegiatan Bina Desa berada di dalam ruang yakni di *homstay* masing-masing SKPD” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

b) Lokasi

Kondisi tempat pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari kurang memadai karena Desa Pandansari merupakan desa kecil. Lebih lanjut diungkapkan oleh Edi Harianto selaku Perangkat Desa Pandansari sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan Bina Desa di Desa Pandansari yang merupakan acara besar, sebenarnya kondisi desa belum memungkinkan karena jalan desa yang kurang lebar dan terlalu banyak kendaraan sehingga macet” (wawancara pada hari hari kamis, 19 Desember 2013 di Kantor Balai Desa Pandansari)

### C. Analisis dan Interpretasi Data

#### 1. Implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa)

Implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan, karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” pada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berdasarkan teori model implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:156-172) dan George Edward III dalam Winarno (2007:175-203) menjelaskan mengenai variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

##### 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Berikut merupakan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan

Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) sesuai Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat” adalah

- a. Menyokong pelaksanaan pembangunan di level Desa melalui kerja bakti maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD
- b. Melakukan kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di Desa
- c. Mengukur kadar keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Malang
- d. Menjaring aspirasi publik di tingkat Desa
- e. Melakukan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat setempat
- f. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.

## 2) Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang tersedia merupakan proses implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari antara lain adalah staf atau petugas yang memadai yaitu sesuai keahlian masing-masing dalam melaksanakan program tugas dan kegiatan dengan yang baik,

informasi mengenai program-program mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, wewenang yang memadai mulai dari bentuk memberi bantuan sampai melaksanakan penyuluhan atau pelatihan sesuai program dari masing-masing SKPD, dan fasilitas-fasilitas yang layak untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten atau yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Hal ini dibuktikan dengan telah terlaksananya kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Faktor kedua yang

mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, perwakilan SKPD yang terlibat melaksanakan rapat koordinasi terlebih dahulu untuk penjelasan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dan program-program kegiatan.

#### 4) Karakteristik badan-badan pelaksana dan Birokrasi

Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi. Dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) SOP masing-masing SKPD berbeda-beda sesuai dengan program kegiatan dari masing-masing SKPD.

5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Dalam pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari kondisi ekonomi desa cenderung lemah karena Desa Pandansari termasuk dalam desa tertinggal. Kondisi sosial masyarakat Desa Pandansari termasuk desa yang tenang dan suasana kekeluargaan masyarakatnya sangat terasa. Sedangkan kondisi politik tidak nampak dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari.

6) Kecenderungan pelaksana (implementor)

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Saat pelaksanaan kegiatan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) ketiga unsur tanggapan tersebut, yakni dalam pemahaman kebijakan masyarakat Desa Pandansari kurang adanya sosialisasi sehingga banyak masyarakat tidak mengerti tujuan sebenarnya dari kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Dalam penerimaan, masyarakat dapat menerima dan mengikuti kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari.

Sedangkan dalam intensitas tanggapan masyarakat telah diwakilkan kepada beberapa orang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

7) Kaitan antara komponen-komponen model

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijaksanaan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Keterkaitan komponen model dalam kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) cukup dinamis. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan program masing-masing SKPD, tanggapan masyarakat yang dapat menerima kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

8) Masalah kapasitas

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Masalah kapabilitas disoroti dalam empat komponen model, yakni: sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dari 4 komponen model tersebut semua berjalan baik kecuali lingkungan

ekonomi karena ekonomi masyarakat Desa Pandansari yang masih kurang karena rata-rata masyarakat bekerja sebagai buruh tani.

Sesuai dengan model teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:156-172) dan George Edward III dalam Winarno (2007:175-203) mengenai variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses implementasi maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) variabel yang berpengaruh meliputi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) yang tercantum dalam Keputusan Bupati Malang nomor : 180/ 121 /KEP/ 421.013/2011 tentang penetapan program “Bupati Menyapa Rakyat”, sumber-sumber kebijakan yaitu petugas dari SKPD yang melaksanakan tugasnya sesuai program, komunikasi antar organisasi yang diwujudkan dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*), karakteristik badan-badan pelaksana dan birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik di Desa Pandansari yang masih kurang karena termasuk desa tertinggal, kecenderungan pelaksana (*implementor*) yang dilihat dari tanggapan masyarakat yaitu dalam pemahaman masyarakat masih minim karena kurangnya sosialisasi kegiatan, penerimaan serta intensitas tanggapan yang lumayan baik, kaitan antara komponen-komponen model yang dinamis yang dapat dilihat dari sumber daya manusia, masalah kapasitas yang ditinjau dari 4 komponen berjalan baik kecuali dalam ekonominya.

a. **Pelaksanaan pembangunan di level desa melalui kerja bakti bersama masyarakat setempat maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD**

Dalam mengimplementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari diperlukan adanya peran serta masyarakat agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Peran serta masyarakat tersebut dapat terwujud jika adanya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dapat terwujud jika masyarakat sudah berdaya sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini transformasi pengetahuan dan

kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

Tahap-tahap pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) telah terwujud di dalam masyarakat Desa Pandansari. Pada tahap penyadaran, telah terbukti dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti

kerjabakti dalam mempersiapkan pelaksanaan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) serta partisipasi masyarakat langsung saat berlangsungnya kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) baik dalam hal pembangunan desa, kegiatan pelayanan dan penyuluhan serta penyampaian aspirasi. Masyarakat Desa Pandansari telah memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap desanya walaupun kesadaran mereka terbentuk karena adanya dorongan dari pejabat-pejabat di desa juga karena ingin desanya berkesan baik selama kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

Pada tahap transformasi pengetahuan, terbukti dengan antusias masyarakat untuk mengikuti penyuluhan atau sosialisasi dari SKPD sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan baru dan menambah ketrampilan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mempraktekkan dan mengembangkan ilmu serta ketrampilan yang telah diberikan SKPD saat pelatihan pada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Sehingga masyarakat dapat mempunyai kegiatan

Tahap peningkatan kemampuan intelektual yakni setelah pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari masyarakat desa telah mempunyai ketrampilan hasil dari pelatihan-pelatihan oleh SKPD. Sehingga mereka dapat mengelola hasil unggulan dari desa mereka untuk jadi produk yang

baru. Misalnya di Desa Pandansari mempunyai produk unggulan krisan, singkong dan apel. Krisan yang biasanya digunakan untuk hiasan rumah atau dekorasi untuk acara-acara seperti pernikahan, dengan adanya pelatihan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan maka krisan tersebut diolah menjadi sirup, apel diolah menjadi sari apel, singkong diolah menjadi kue bolu. Hal tersebut merupakan inovasi sehingga masyarakat dalam memanfaatkan potensi desanya dan dapat memperkenalkan produk unggulan desa mereka.

Untuk dapat memenuhi tahap-tahap pemberdayaan tersebut maka dibutuhkan suatu strategi. Strategi dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut merupakan empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain:

- a. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek
- b. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif dan efisien
- c. Mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya
- d. Memaksimalkan peran pemerintah (khususnya pemerintahan kelurahan dan desa) dalam memfasilitasi dan mengatur

pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan terbenuhinya strategi-strategi di atas maka akan tercapai untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan, kerja bakti dan juga adanya dukungan dari warga untuk mensukseskan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari.

**b. Kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di desa**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan di atas meja para pejabat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilaksanakan di Desa Pandansari telah sesuai dengan jadwal yaitu dilaksanakan di bulan februari 2012.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan penyuluhan dilaksanakan pada hari kedua kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Kegiatan pelayanan dan penyuluhan dilaksanakan di masing-masing *homestay* SKPD terkait atau tempat-tempat yang telah

disediakan. Pemberian pelayanan oleh pemerintah kabupaten juga telah diamanatkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 14 tentang Pemerintah Daerah terdapat beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berskala kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari urusan wajib yang telah disebutkan di atas menyebutkan bahwa pemberian pelayanan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berskala kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang baik dan benar seharusnya sesuai dengan asas dan prinsip pelayanan publik. Berikut merupakan asas pelayanan public berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 dalam Siti Rochmach (2011:6) sebagai berikut:

a. Transparansi

Bersifat *terbuka*, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi

f. Keseimbangan Hak Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004 dalam Siti Rochmach (2011:7) disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus dapat memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup dalam hal:

- Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
- Unit kerja/pejabat berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik

- Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- Kepastian waktu

c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

f. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika

i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain lain.

Implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari dalam pemberian pelayanan rata-rata telah sesuai dengan asas dan prinsip pelayanan publik di atas. Misalnya dalam hal asas transparansi, dengan adanya kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) maka yang biasanya mengurus kartu keluarga harus ke desa lalu ke kecamatan kemudian ke kecamatan maka pada saat Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) pelayanan tersebut didekatkan ke desa sehingga masyarakat mengetahui secara langsung prosedur pembuatan kartu keluarga. Dalam kondisional, partisipatif dan kesamaan hak, ditunjukkan dengan pelayanan diberikan tidak memandang status keluarga, semua diberi pelayanan yang terbaik dan masyarakat ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan pelayanan maupun penyuluhan yang ada.

Sedangkan dalam hal prinsip ditunjukkan dengan pelayanan yang mudah, kejelasan syarat, petugas yang ramah, kenyamanan tempat saat kegiatan pelayanan dan penyuluhan. Akan tetapi, dalam hal ketepatan mungkin kurang sesuai misalnya dalam pembuatan kartu keluarga yang selesai setelah 1 bulan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Dan adanya biaya dalam pembuatan KTP sebesar Rp 5000,-

**c. Kegiatan menjaring aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa**

Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilakukan salah satu tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat, sering terjadi tuntutan yang berlebihan terhadap kemampuan aparatur atau birokrasi pemerintahan yang selalu harus bekerja dengan sempurna. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) diharapkan adanya masyarakat dapat memahami kesulitan dalam pemerintahan sehingga terjalin rasa saling pengertian.

Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Desa Pandansari menyampaikan aspirasinya dalam 2 hal yakni mengenai:

### 1) Infrastruktur

Dalam masalah infrastruktur desa, masyarakat menginginkan perbaikan dalam hal:

#### - Jalan

Jalan desa yang masih tanah atau makadam setelah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) telah diperkeras atau dicor dan untuk jalan utama desa yang banyak berlubang telah diperbaiki sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat Desa Pandansari.

#### - Penerangan Jalan

Desa Pandansari dalam penerangan jalan masih kurang sehingga masyarakat tidak nyaman untuk keluar malam. Untuk itu, setelah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) penerangan jalan di gang-gang Desa Pandansari telah ditambah sehingga masyarakat nyaman saat akan keluar malam.

#### - Sekolah

Di Desa Pandansari sekolah tertinggi hanya sampai setingkat SMP yaitu SMP Al Hidayah. Dan untuk melanjutkan ke tingkat SMA harus ke desa lain yang jauh yaitu ke Desa Wonomulyo terdapat SMK Sunan Ampel atau di Desa Belung terdapat MA Al-Ittihad. Akan tetapi, akses untuk ke desa-desa tersebut sulit dikarenakan

kurangnya kendaraan umum yang melintasi Desa Pandansari. Setelah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) telah dibangun MA Al-Hidayah yang mulai ditempati tahun 2013.

## 2) Ekonomi Desa

Masyarakat Desa Pandansari sebagian besar adalah bekerja sebagai buruh tani. Sehingga masyarakat menginginkan untuk membentuk kelompok usaha bersama yang bergerak dalam bidang peternakan. Kelompok tersebut berharap diberi bantuan kambing boer. Kambing boer tersebut akan disilangkan dengan kambing lokal. Akan tetapi, dengan harga kambing boer yang mahal masyarakat tidak sanggup untuk membelinya juga sulit untuk mendapatkan kambing boer tersebut.

## **2. Faktor-faktor kritis dalam implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang**

Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat hal-hal dapat yang mempengaruhi. Sebelum menganalisis faktor-faktor kritis dalam proses implementasi kebijakan maka lebih dahulu harus menganalisis faktor penyebab suatu kebijakan diimplementasikan. Berikut penulis akan menganalisis penyebab kemiskinan berdasarkan dengan keadaan Desa

Pandansari, beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Universitas Brawijaya Malang (2006:38-41) dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
- c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan
- d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan
- e. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi
- f. Terbatasnya akses terhadap air bersih
- g. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
- h. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam
- i. Lemahnya jaminan rasa aman
- j. Lemahnya partisipasi
- k. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi

Menurut Indra Maipita dalam penyebab dan dampak kemiskinan menyebutkan bahwa kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor antara lain:

a. Ketidakberdayaan

Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan

b. Keterkucilan

Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin

c. Kemiskinan materi

Kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah

d. Kerentanan

Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin

e. Sikap

Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

( <http://www.waspada.co.id>)

Berdasarkan faktor-faktor penyebab kemiskinan di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa penyebab kemiskinan di Desa Pandansari dari pengamatan penulis dilapangan antara lain: rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan kualitas pendidikan masyarakat yang rendah yaitu sebagian besar pendidikan penduduk Desa Pandasari hanya lulusan SD sehingga penduduk tidak mempunyai ketrampilan dan keahlian yang memadai. Pelayanan pendidikan di Desa Pandansari juga masih rendah karena tenaga pengajar yang berasal dari masyarakat desa yang bukan merupakan lulusan sekolah keguruan sehingga hanya masyarakat yang menengah kebawah yang bersekolah di sekolah tersebut, yaitu anak-anak yang bersekolah setelah bekerja membantu orang tuanya dan untuk anak yang orang tuanya tergolong mampu, mereka lebih memilih mensekolahkan anaknya ke desa lain yang kualitasnya lebih baik. Selain itu, kurangnya sarana transportasi umum sehingga akses ke luar desa masih sulit.

Penduduk Desa Pandansari dalam masalah pelayanan kesehatan masih kurang hal ini terbukti dari hanya ada 1 tenaga kesehatan yaitu bidan desa, sehingga jika terdapat penduduk yang sakit mereka berobat kepada bidan desa. Apabila ingin berobat ke dokter atau ke klinik masyarakat harus ke desa lain yang berjarak  $\pm 7$  km dan jika ingin ke rumah sakit masyarakat harus menempuh jarak  $\pm 12$  km.

Dalam pekerjaan masyarakat Desa Pandansari rata-rata bekerja sebagai buruh tani. Walaupun banyak masyarakat yang memiliki tanah

sendiri tetapi mereka lebih memilih untuk menyewakan atau menjualnya karena tidak ada biaya untuk merawat dan mengelola tanah tersebut. Sedangkan upah sebagai buruh tani untuk laki-laki sebesar Rp 15.000 untuk perempuan sebesar 12.500, sehingga dalam 1 bulan sepasang suami istri hanya menghasilkan kurang dari UMR yaitu sebesar Rp 825.000.

Selain itu, kurangnya sarana prasarana yaitu terbatasnya kendaraan umum ke Desa Pandansari sehingga tidak jarang masyarakat yang jalan kaki untuk menuju desa tetangga. Serta sikap masyarakat yang apatis yaitu menerima apa adanya yang mereka dapatkan dan tidak ada kemauan atau motivasi untuk maju karena mereka beranggapan yang penting dapat berkumpul dengan keluarga. Sikap ini dibuktikan yaitu setelah mendapatkan bantuan dan ketrampilan dari kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) tidak ada inisiatif dari masyarakat untuk melanjutkan atau mengembangkan bantuan atau ketrampilan tersebut.

Oleh karena faktor-faktor di atas maka Desa Pandansari tergolong sebagai desa miskin sehingga seharusnya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengentaskan kemiskinan melalui kebijakan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) perlu ada pengawasan dan tindak lanjut karena tidak mungkin mengentaskan kemiskinan dalam 2 hari. Karena setelah 2 tahun pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) di Desa Pandansari hanya mempunyai sedikit pengaruh dalam pengentasan kemiskinan di Desa

Pandansari. Misalnya yang dahulu jalan kampung yang masih berupa tanah sekarang telah diperkeras atau dicor dan sekolah setingkat SMA yaitu MA Al Hidayah telah dibangun meskipun murid dan tenaga kerja yang sedikit sedangkan untuk masalah lain belum ada perubahan seperti dalam bidang kesehatan yaitu kurangnya tenaga medis dan perekonomian masyarakat yang masih tetap.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi menurut Zainal Abidin (2012:147-152) yaitu sebagai berikut:

**a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dari dalam organisasi. Faktor internal menurut Zainal Abidin (2012:147-152) meliputi: kondisi kebijakan serta faktor pendukungnya. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, legitimasi, dan partisipasi.

Kondisi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 tanggal 23 Februari 2011, tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat. Sedangkan sumber daya merupakan faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang terdiri dari SKPD Kabupaten Malang sebagai subyek yang telah memberikan pelayanan baik dan masyarakat sebagai obyek yang telah ikut berpartisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat

Desa Pandansari telah baik, hal tersebut terbukti dengan antusias masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).

Dalam keuangan yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) berasal dari masing-masing SKPD pelaksana sedangkan Desa Pandansari sebagai obyek kegiatan memerlukan dana untuk akomodasi keamanan saat kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Bantuan yang diberikan berupa sumbangan kepada masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur desa dan kebutuhan untuk murid sekolah. Penyampaian informasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilakukan secara top down dari Pemerintah Kabupaten kepada kecamatan kemudian kecamatan menyampaikan kepada pihak desa dan melalui RT/RW pihak desa menyampaikan pelaksanaan kegiatan bina desa kepada masyarakat.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dari luar organisasi. Faktor eksternal menurut Zainal Abidin (2012:147-152) meliputi: kondisi lingkungan dan factor pendukung lainnya. Faktor pendukung tersebut antara lain:

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam.
- 2) Faktor politik

- 3) Tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan.
- 4) Terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor *input*.
- 5) Kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
- 6) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri.

Faktor eksternal mempengaruhi implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) adalah kondisi fisik yaitu cuaca saat pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) adalah hujan. Akan tetapi, kegiatan tetap berlangsung dengan lancar karena kegiatan dilaksanakan dalam ruang ruang yaitu di *homestay* masing-masing SKPD. Dan untuk lokasi yaitu di Desa Pandansari yang merupakan desa kecil. Jumlah kendaraan yang ada tidak sebanding dengan lebar jalan sehingga terjadi kemacetan.

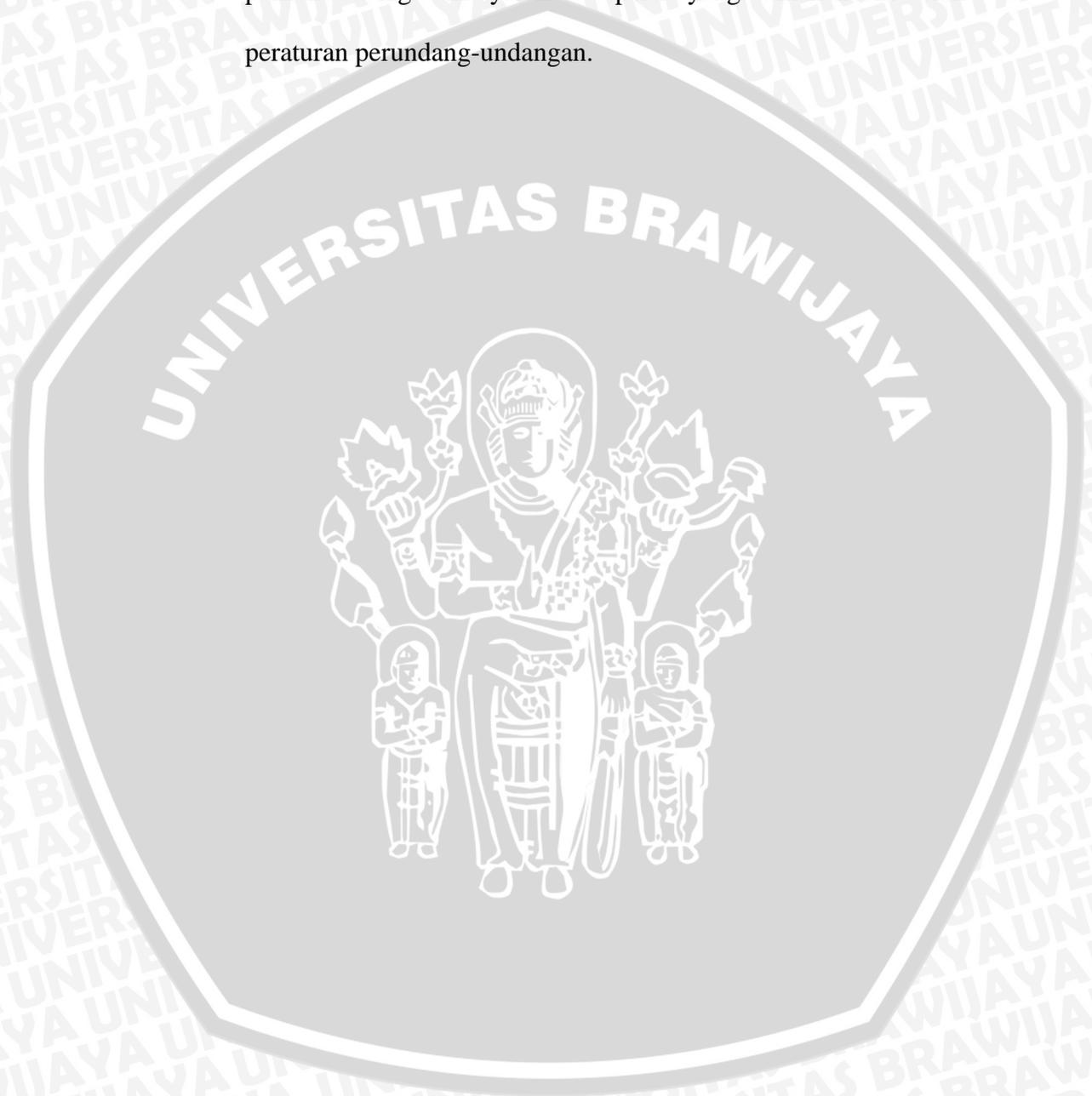
Untuk faktor lain seperti faktor politik, tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang, terjadi penundaan karena keterlambatan atau kekurangan faktor *input*, kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa langkah implementasi, dan kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri tidak memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Karena pada dasarnya kegiatan ini juga merupakan kegiatan pokok

yang biasa dilakukan sesuai tugas masing-masing SKPD tetapi berbeda dalam hal tempat.

Untuk itu dibutuhkan beberapa cara dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik menurut Sunggono (1994:158), yaitu:

- 1) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan hukum.
- 3) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

- 4) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah disampaikan melalui pengumpulan data, penyajian serta analisa data di atas, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yang nantinya diharapkan mampu membuat sebuah gambaran yang akan mewakili bagaimana proses implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Malang beserta satuan kerjanya (SKPD) melaksanakan pembangunan di level desa melalui kerja bakti bersama masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur desa serta pemberian bantuan-bantuan. SKPD yang terlibat dalam kegiatan pembangunan meliputi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Diklat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, PDAM.
2. Kegiatan pelayanan publik dan penyuluhan yang dilakukan oleh SKPD terkait secara teknis berlangsung selama 20 jam. SKPD yang terlibat dalam pelayanan dan penyuluhan meliputi UPT Perijinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga

Bencana, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Dinas Koperasi dan UMKM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

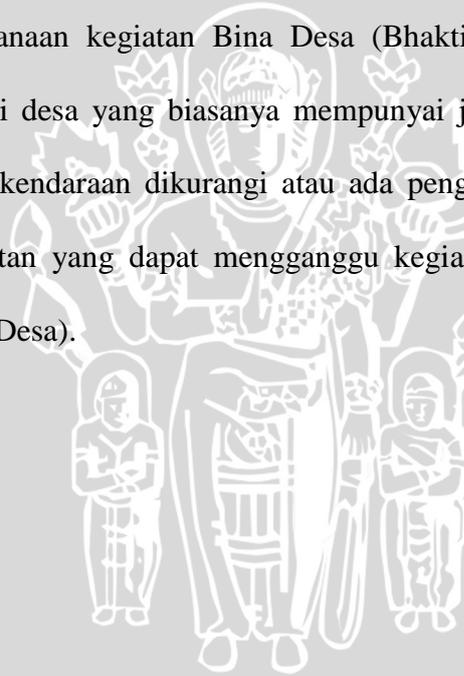
3. Penjaringan aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu tujuan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa). Selain itu, tujuan lainnya adalah agar masyarakat dapat mengerti kesulitan di pemerintahan sehingga terdapat rasa saling pengertian.
4. Terdapat 2 faktor kritis dalam pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi kebijakan dan sumber daya serta faktor eksternal meliputi faktor cuaca dan faktor lokasi.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang semoga dapat membantu jalannya proses implementasi kebijakan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang. Beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Agar dalam pemberian bantuan seharusnya disesuaikan dengan lokasi dan potensi yang dimiliki desa. Misalnya dalam bantuan ikan lele yang tidak cocok untuk dikembangkan di Desa Pandansari akan lebih baik kalau untuk perkembangbiakan hewan ternak karena melimpahnya rumput.

2. Agar ada pengawasan lebih lanjut setelah kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) akan bantuan dan penyuluhan yang telah diberikan agar benar-benar mempunyai manfaat untuk masyarakat.
3. Agar dalam menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) lebih merata karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui kalau akan ada kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).
4. Karena pelaksanaan kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dilaksanakan di desa yang biasanya mempunyai jalan sempit, sebaiknya untuk volume kendaraan dikurangi atau ada pengaturan jalur agar tidak terjadi kemacetan yang dapat mengganggu kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Universitas Brawijaya Malang. 2006. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Malang*. Malang: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang dan Universitas Brawijaya Malang.
- Bogdan, Robert C. and Taylor K. B. 1992. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dunn, William N. 2001. *Analisis Kebijaksanaan Publik*, disadur Dr. Muhadjir Darwin. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widia.
- Fachrudin, Reza. *Implementasi Perda No. 8 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan)*. Malang: FIA UB.
- Islamy, Irfan. 1998. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maipita, Indra. 5 November 2013. *Penyebab dan Dampak Kemiskinan*. diakses pada tanggal 29 Mei 2014 pukul 05.39 WIB, dari [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=305856:penyebab-dan-dampak-kemiskinan&catid=25:artikel&Itemid=44](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=305856:penyebab-dan-dampak-kemiskinan&catid=25:artikel&Itemid=44)
- Makmur, Mochammad. 2009. *Ekologi Administrasi Publik Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan*.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nehrudin. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Malang*. Malang: Bappeda Kabupaten Malang.
- Nugroho Dwidjowijoto, Riant. 2006. *Kebijakan publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo .
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan konsep kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rochmach, Siti. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Malang: Universitas Negeri Press (UM Press).
- Septianto, Ryan Eko. *Implementasi Kebijakan Pro Rakyat Miskin Yang Berwawasan Pemberdayaan (Studi Pada Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan)*. Malang: FIA UB.
- Sinambela, Lajian Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. 3 Januari 2013. *Kemiskinan Indonesia Semakin Kronis*. diakses pada tanggal 7 November 2013 pukul 12:30 WIB, dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/03/16570788/Kemiskinan.Indonesia.Semakin.Kronis>
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media Jogja.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/121/KEP/421.013/2011 Tentang Penetapan Program Bupati Menyapa Rakyat.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Press (UM Press).
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). diakses pada tanggal 7 November 2013 pukul 13.00 WIB, dari <http://www.tnp2k.go.id/program/program/>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- <http://www.malangkab.go.id/>
- [http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page\\_id=5](http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page_id=5)

**DAFTAR LAMPIRAN****BUPATI MALANG**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 180/ 121 /KEP/421.013/2011  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM "BUPATI MENYAPA RAKYAT"**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjangkau aspirasi publik secara langsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Malang serta meningkatkan komunikasi antar elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Program "BUPATI MENYAPA RAKYAT";
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Program "BUPATI MENYAPA RAKYAT" dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Program “BUPATI MENYAPA RAKYAT” dengan 3 (tiga) bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. NGOPI bareng Bung Rendra (Ngobrol Pagi Bersama Bung Rendra);
2. Anjangsana 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan;
3. BINA DESA (Bhakti Sosial Menata Desa).

**KEDUA** : *Term of Reference* Program “BUPATI MENYAPA RAKYAT” sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**KETIGA** : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

bertanggung jawab secara administratif atas penetapan Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 23 Februari  
2011

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**

**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten  
Malang;
2. Kepala Badan  
Pemberdayaan Masyarakat  
Kabupaten Malang;
3. Kepala Bagian Hubungan  
Masyarakat Sekretariat  
Daerah Kabupaten Malang;
4. Kepala Bagian Tata  
Pemerintahan Umum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Malang;
5. Kepala Bagian Tata  
Pemerintahan Desa  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 180/ 121 /KEP/421.013/2011  
TANGGAL : 23 Februari 2011

***TERM OF REFERENCE (TOR)***  
**PROGRAM “BUPATI MENYAPA RAKYAT”**

### 1.1 Pendahuluan

Kebijakan publik dalam ranah politik yang diproduksi oleh pemerintah memerlukan proses dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah sesuai dengan target. Parameter dari kebijakan publik jauh lebih luas dari itu sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal inilah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Malang melalui kegiatan “BUPATI MENYAPA RAKYAT” diharapkan secara umum, hasil evaluasi dan menguak permasalahan di masyarakat Kabupaten Malang serta bermanfaat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan publik sekaligus mengakses permasalahan yang belum tersentuh, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk meneruskan atau membatalkan kebijakan tersebut. Tentu saja, apabila kebijakan publik yang diciptakan berhasil, maka kebijakan tersebut layak untuk diteruskan, demikian sebaliknya. Hal ini terutama dalam konteks mendukung bagi perkembangan demokrasi dan peningkatan kualitas layanan pada masyarakat di daerah yang mutlak perlu dukungan elemen *stakeholders* di daerah.

Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa ruang publik (*public sphere*). Merujuk pada konsep awalnya, praktek utama dalam sebuah demokrasi adalah komunikasi yang setara antara penduduk di suatu wilayah. Komunikasi yang terjadi di ruang-ruang publik bukanlah semata perbincangan yang sekedar menggossip tanpa tujuan yang pasti (atau “komunikasi naif”), namun diskusi yang mengarah pada tujuan-tujuan politis yaitu untuk kebaikan bersama. Tentunya, kondisi tersebut merupakan sebuah kondisi ideal tentang demokrasi, demokrasi yang bukan semata direduksi dalam tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah, namun penglibatan rakyat secara penuh untuk menentukan arah perbaikan kehidupan.

Dengan dimungkinkannya proses pengembangan demokratisasi di daerah, maka yang menjadi urgen adalah memperkuat aspek kelembagaan (*capacity*

*building*), dimana kelembagaan dimengerti sebagai regulasi perilaku atau aturan-aturan baku yang disepakati oleh anggota kelompok sosial sebagai upaya menjaga agar ranah demokrasi tetap berjalan pada koridornya. Upaya penguatan kelembagaan ini juga difokuskan hingga ke wilayah perdesaan, dalam upaya meningkatkan demokratisasi masyarakat Kabupaten Malang yang notabene berbasis di kawasan perdesaan. Dengan otonomi daerah maka diharapkan meningkatkan partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan yang inheren dengan demokrasi lokal.

Apa elemen-elemen demokrasi yang melekat dalam desentralisasi dan otonomi daerah di tingkat lokal? Bagaimana desentralisasi dapat membantu memperdalam demokrasi di tingkat lokal? Dua pertanyaan ini sangat krusial ketika berbincang tentang kaitan antara demokrasi dan desentralisasi. Bagaimana kita memahami dan menjabarkan pemerintahan rakyat itu? Pemerintahan “dari” rakyat berarti pemerintah daerah yang berasal dari partisipasi rakyat, pemerintahan “oleh” rakyat berarti pemerintah menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan akuntabel, sedangkan pemerintahan “untuk” rakyat berarti pemerintah mempunyai daya tanggap (responsif) terhadap kepentingan rakyat banyak. Partisipasi merupakan elemen terpenting demokrasi dalam konteks otonomi daerah. Sebagai bentuk keterlibatan warga masyarakat, partisipasi masyarakat terkait dengan pemilihan lokal untuk keperluan rekrutmen jabatan-jabatan publik (eksekutif dan legislatif), penyampaian aspirasi (*voice*) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah, akses terhadap informasi kebijakan-keuangan-pelayanan secara transparan dan bebas, serta kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan DPRD. Persoalan partisipasi ini dalam konteks otonomi daerah merupakan barang ekstra konstitusional yang harus dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah dan secara empirik harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat politik serta organisasi masyarakat sipil. *Voice* dan kontrol masyarakat yang kuat juga akan mendorong pemerintahan daerah lebih transparan, akuntabel dan reponsif.

Saat ini keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan pun telah direduksi dalam sistem perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, baik Pusat maupun di masing-masing daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pada kondisi macam ini, kepentingan rakyat kerap kali terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan partai politik yang menempatkan anggotanya di lembaga legislatif tersebut, sehingga kepentingan yang sampai pada para perencana pembangunan belum tentu kepentingan yang murni dibutuhkan oleh rakyat. Dalam benak mayoritas rakyat,

partisipasi politik masih dimaknai hanya sebatas keterlibatan mereka dalam pemungutan suara pada saat pemilihan umum. Padahal, partisipasi politik bukan semata di pemilihan umum. Dalam jagad globalisasi yang ditandai dan didukung dengan percepatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi ini, keterlibatan rakyat dalam keputusan politik ternyata bisa jauh lebih luas daripada sekedar ritual pemungutan suara.

Keterlibatan dalam pemerintahan lokal demokratis adalah suatu kekuatan edukatif yang besar sebagaimana pendapat John Stuart Mill, yakni mengajarkan warga untuk melihat melebihi kepentingan langsung mereka, mengenali permintaan-permintaan adil dari orang lain, dan jika perlu, menerima keputusan yang pada awalnya tidak mereka sukai. Akan tetapi, potensi edukatif pemerintahan lokal tersedia bukan hanya bagi mereka yang bertugas didalamnya, seperti diusulkan Mill, tetapi pada semua penduduk lokal. Bahkan Benjamin Barber (1984) menekankan peran vital pemerintahan lokal sebagai “pusat pembicaraan”: ”tujuannya bukanlah untuk menerapkan kekuasaan atau membuat kebijakan, tetapi untuk menanamkan kompetensi warga”. Lewat proses deliberasi lokal, warga menjadi sadar akan kepentingan-kepentingan lain dan menyusun suatu konsepsi yang lebih nyata tentang apa yang secara politis lebih layak dibanding yang akan mereka capai dalam isolasi suatu kotak suara. Orang belajar, dengan keterlibatan langsung mereka dalam urusan-urusan lokal, apa yang mungkin, praktis, dan bijaksana. Pengalaman mengajarkan mereka penggunaan kekuasaan dan otoritas serta kebutuhan akan konsultasi dan negosiasi, sebagai dua bentuk praktek yang vital bagi stabilitas demokrasi.

Tujuan demokrasi deliberatif adalah memperoleh legitimasi yang didasarkan pada rasionalitas yang mumpuni dalam proses memutuskan sebuah kebijakan. Sebuah institusi dibentuk guna mengakui pelbagai kepentingan kelompok yang terbangun dalam proses deliberasi kolektif yang mencakup rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan individu. Dengan demikian maka hasil yang dicapai adalah rasionalitas dan legitimasi. Dalam proses deliberasi kebijakan publik tidak semata-mata mengutamakan prosedur dan suara mayoritas warga negara, akan tetapi negara harus lebih dulu mengajak dialog atau musyawarah masyarakat sipil untuk mencapai konsensus atau kesepakatan dalam suasana yang diskursif, dengan demikian maka proses deliberasi kebijakan publik akan berjalan secara *fair* dan legitimet.

Pemerintahan lokal yang demokratis dapat juga membangun legitimasi dengan membuat pemerintah lebih responsif pada kebutuhan-kebutuhan warga. Agar responsif, suatu pemerintahan harus mengenali beragam problem yang

dihadapi masyarakat. Perjumpaan-perjumpaan antara rakyat dan (aparatus) pemerintah bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pada perjumpaan-perjumpaan itulah sebenarnya terjadi juga perjumpaan aspirasi kepentingan antara rakyat dan (aparatus) pemerintahan. Rakyat ingin agar pemerintah memperhatikan kepentingan mereka, sementara itu pemerintah pun ingin agar rakyat memahami segala usaha yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Tentunya, perjumpaan ini pun tidak boleh melampaui batas kelembagaan yang disepakati.

Dalam konteks ini sangat dipentingkan membangun saluran komunikasi yang efektif antara Pemerintahan Kabupaten Malang dengan segenap unsur masyarakat maupun pemerintahan yang berada dibawahnya yakni Kecamatan, Desa/Kelurahan. Pola komunikasi dua arah dan diharapkan akan memiliki efek domino dalam memacu kinerja SKPD serta meningkatkan peran partisipatif masyarakat bagi proses pembangunan Kabupaten Malang. Partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara pelbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya (*trust*). Dengan adanya rasa saling percaya ini, maka dialog dan konsensus akan terwujud untuk meraih tujuan yang disepakati bersama.

Belajar dari negara lain itu menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah yang dikelola secara otentik dan bermakna secara prosesual akan membuahkan kehidupan *local governance* yang lebih demokratis dan semarak. Pertama, pemerintahan lokal yang demokratis mampu mendorong negara lebih dekat dengan masyarakat lokal, dan sekaligus mendorong kompetensi dan kepercayaan masyarakat yang lebih kuat pada pemerintah lokal. Kedua, pemerintah lokal bisa membangkitkan partisipasi masyarakat dalam urusan publik, tidak hanya dari sisi *voice* dan kontrol tetapi juga akses dan kepemilikan lokal. Ketiga, desentralisasi mampu mendorong kehidupan masyarakat sipil lebih *vibrant*, semarak, saling percaya dan toleran. Keempat, desentralisasi bisa mendorong responsivitas dan akuntabilitas lokal, sehingga bisa mendongkrak legitimasi pemerintah lokal di hadapan masyarakat. Pada gilirannya, semua ini memungkinkan pemerintahan lokal lebih stabil dan efektif dalam memberikan layanan publik dan mengelola pembangunan daerah.

Dalam upaya penguatan layanan publik, demokratisasi lokal, legitimasi pemerintahan sekaligus sosialisasi program/kegiatan pembangunan, maka dirancang kegiatan “BUPATI MENYAPA RAKYAT” bersama Bung Rendra guna lebih mendekatkan pemimpin ke masyarakat serta melakukan suatu dialog otentik dan komunikasi secara lebih efektif yang muaranya akan mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Secara Umum

1. Menjaring aspirasi publik bagi proses pembangunan di Kabupaten Malang;
2. Melakukan dialog/ngobrol pagi secara substansi antara pemimpin (Bupati) didampingi SKPD terkait dengan bersama seluruh elemen masyarakat;
3. Mensosialisasikan program/kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan publik di Kabupaten Malang;
4. Mendorong dan memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya;
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang;
6. Mengukur kadar keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang;
7. Penguatan akses layanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

### 1.3 Bentuk Kegiatan

1. *Talk Show* melalui “Ngopi Bareng dengan Bung Rendra”.

Kegiatan ini dirancang sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi, sosialisasi sekaligus sarana dialog warga dengan Bung Rendra untuk lebih mendekatkan dan menguatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang yang responsif dan transparan. Acara ini dikemas dalam *Talk Show* bersama RRI yang melibatkan unsur pemerintahan di Kabupaten Malang sesuai tematik/permasalahan yang dikupas, sekaligus “on-air”. Oleh karenanya masyarakat dapat langsung menyampaikan hal-hal/permasalahan dengan tema disampaikan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Selasa, minggu kedua dan ke-empat tiap bulan mulai pukul 06.00-07.00 WIB.

2. Anjaksanaan di Kecamatan (33 Kecamatan).

Dalam upaya mensosialisasikan Visi dan Misi Bung Rendra, maka kegiatan ini dilakukan dengan melakukan *road show* ke 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang secara bergiliran. Tujuan utamanya adalah mempertemukan *stakeholder* di level Kecamatan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Upaya ini sejalan dimana sosialisasi Visi dan Misi tersebut diharapkan akan menjadi pilar bagi rencana pembangunan Kabupaten Malang 5 (lima) tahun ke depan.

### 3. Bina Desa dalam Bakti Sosial Menata Desa.

Karakteristik desa-desa di Kabupaten Malang yang sangat beragam dengan jumlah 378 Desa, menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin daerah untuk mampu mendorong bagi percepatan pembangunan sekaligus memberikan perhatian kepada masyarakat desa sebagai basis wilayah di Kabupaten Malang. Kegiatan ini dirancang pada tahun ke dua atau Tahun 2012. Kegiatan ini difokuskan pada sekitar 160 Desa. Hal ini juga dirancang dengan melibatkan desa-desa terdekat di wilayah yang dituju, sehingga dengan model *clustering* tersebut akan terjangkau semua desa. Acara ini sekitar 9 (sembilan) bulan dan diselingi dengan agenda Safari Ramadhan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Bung Rendra bersama elemen Pemerintah Kabupaten Malang antara lain: kegiatan olah raga bersama masyarakat setelah kedatangan, acara temu warga secara santai bersama Bung Rendra, Sholat Shubuh, dilanjutkan acara sambang warga ke rumah sekitar Masjid, olah raga, kerja bakti, berikutnya kegiatan layanan-layanan publik misalnya layanan IMB, Catatan Sipil, Perijinan, layanan kesehatan, bantuan sosial-keagamaan, bantuan bagi warga miskin dan tak kalah pentingnya adalah melakukan observasi atas kekuatan/potensi desa yang bisa dikembangkan.

Secara lebih rinci, cakupan kegiatan yang dimaksud merupakan suatu rangkaian kegiatan yang simultan dan saling berkaitan diantara ketiga agenda kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini dirancang dalam upaya mendekatkan fungsi sebagai Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengayomi dan memberdayakan, serta mendekatkan secara substansi potensi serta dalam upaya jejaring dalam penyelesaian suatu permasalahan yang menyangkut dengan layanan publik maupun bagi percepatan program/kegiatan pembangunan.

Tabel Matrik Rencana Kegiatan

No.	Kegiatan	Tujuan Khusus	Rencana Pelaksanaan	Target
1	Talk Show di Radio Republik Indonesia Malang dengan Tema NGOPI Bareng BUNG RENDRA (Ngobrol Pagi Bersama Bung Rendra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaring permasalahan dan proses solusinya dengan pihak terkait;</li> <li>b. Menjaring aspirasi publik tentang pembangunan di Kabupaten Malang;</li> <li>c. Menjembatani aspirasi publik ke lembaga yang tepat di Pemerintah Kabupaten Malang;</li> <li>d. Mensosialisasikan program-program yang sudah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang;</li> <li>e. Mengukur kadar keberhasilan program yang sudah dijalankan melalui publik;</li> <li>f. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.</li> </ul>	Dwi mingguan (setiap Selasa ke-dua dan ke-empat) pukul 06.00-07.00 WIB.	Audiens di Kabupaten Malang.
2	Anjangsana di setiap Kecamatan, meliputi 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mensosialisasikan Visi dan Misi serta program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang ke level Kecamatan (RPJM-D);</li> <li>b. Menjaring aspirasi publik di tingkat Kecamatan;</li> <li>c. Mempertemukan warga dan SKPD terkait secara langsung dalam program-program/kegiatan yang dicakup dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi;</li> </ul>	Kunjungan mingguan secara bergiliran ke Kecamatan se-Kabupaten Malang.	Publik ( <i>stakeholder</i> ) di tingkat Kecamatan.

No.	Kegiatan	Tujuan Khusus	Rencana Pelaksanaan	Target
		d. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.		
3	Bina Desa "Bakti Sosial Menata Desa".	<p>a. Menyokong pelaksanaan pembangunan di level Desa melalui kerja bakti maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD;</p> <p>b. Melakukan kegiatan layanan publik dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di Desa;</p> <p>c. Mengukur kadar keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Malang;</p> <p>d. Menjaring aspirasi publik di tingkat Desa;</p> <p>e. Melakukan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat setempat;</p> <p>f. Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang.</p>	Mingguan, dengan cakupan sekitar 160 Desa di wilayah Kabupaten Malang	Rakyat ( <i>stakeholder</i> ) di tingkat Desa.

#### 1.4 Hasil Yang Diharapkan

1. Terjangungnya harapan-harapan publik/masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Malang.
2. Tersampainya dan percepatan program/kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Meningkatkan angka partisipasi publik dalam setiap program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang.
4. Peningkatan kualitas layanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada masyarakat.
5. Terjalannya komunikasi antar level pemerintahan yang lebih efektif.
6. Terevaluasinya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang.

Dalam konteks desentralisasi politik, organisasi masyarakat sipil merupakan hal yang penting dalam membuat tuntutan agar kemampuan sektor publik menjadi lebih baik dan pemerintah mampu bertanggung jawab atas kinerjanya. Sedangkan dalam konteks administrasi baru, para inovator dapat membuat aturan formal, regulasi, atau hukum sebagai tujuan akhir aktivitas dalam melakukan perubahan meskipun disadari pula bahwa terdapat adanya *gap* antara kebijakan formal dengan pelaksanaannya pada saat sebuah kebijakan di implementasikan di lapangan. Di sinilah konsep *going local* dibutuhkan sebagai syarat desentralisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan semakin diakui (legimitasinya) oleh masyarakat.

Untuk bisa menghasilkan keputusan politik dan hukum yang legitimet, sehingga memiliki kekuatan intergratif bagi masyarakat, dapat diberikan solusi terhadap persoalan legitimasi melalui administrasi administrasi deliberatif yang secara normatif yang selaras dengan ketiga bentuk kegiatan diatas melalui:

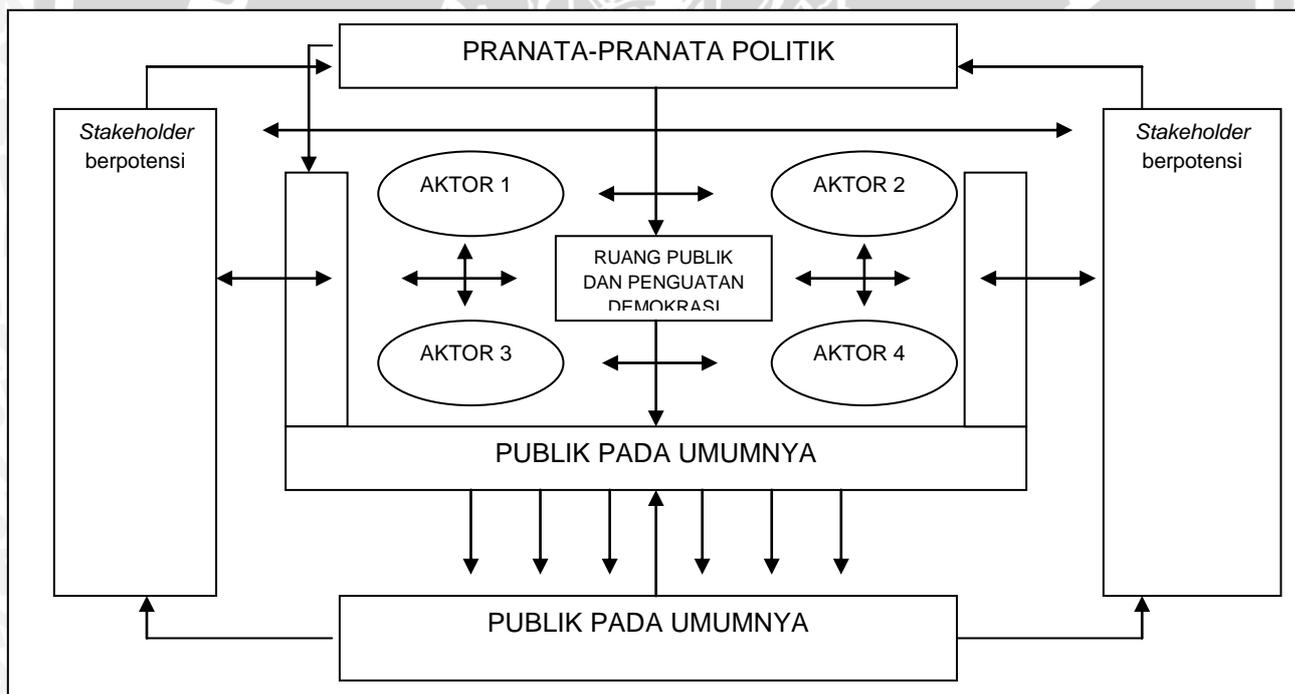
1. Bentuk pertukaran informasi dan argumen yang dapat diterima;
2. Bersifat inklusif dan terbuka untuk publik, tidak seorang pun secara memiliki kuasa mutlak atas yang lain;
3. Bersifat bebas dari koersi eksternal maupun internal yang bisa mengurangi kesetaraan partisipan;
4. Tujuan deliberasi secara rasional didorong oleh kesepakatan dan secara prinsip bisa dilanjutkan diberbagai kesempatan;
5. Deliberasi meluas dalam pelbagai persoalan yang bisa diatur dalam kesetaraan pelbagai kepentingan kelompok yang mempengaruhi kesejajaran dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik;
6. Deliberasi mesti juga mencakup penafsiran atas pelbagai kebutuhan, artikulasi identitas kolektif dan perubahan perilaku dan pilihan-pilihan prapolitis. Pada konteks ini deliberasi harus memperluas persilangan spektrum moral, etis dan diskursus pragmatis agar tetap tersedia sebuah ruang. Untuk tawar-menawar dan berkompromi secara adil serta kepentingan-kepentingan antigeneralisasi yang mengambil tempat diluar pengaturan internasional non-deliberatif (lihat Zauhar, 2007).

Berdasarkan konsep diatas, maka dapat dipahami bahwa legitimitasi tidak meniadakan kelompok lainnya dalam memutuskan sebuah kebijakan melainkan satu sama lain berdiskursus berdasarkan kekuatan argumentasi. Untuk melihat

gambaran yang jelas tentang peran aktor dalam kebijakan publik pada umumnya dapat dilihat dari Teori Metafora Arena yang dikemukakan oleh Ortwin Renn (1992). Dalam Teori Metafora Arena, terdapat 2 (dua) asumsi dasar dalam memaknai konteks tersebut:

1. Model ini tidak memandang proses kebijakan publik sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan sebagai serentetan upaya negoisasi berlapis-lapis yang melibatkan kelompok aktor yang langsung berpartisipasi.
2. Dalam melihat peran aktor pada proses peran itu, Teori Metafora Arena sosial sangat selektif. Ringkasnya, model ini hanyalah berkepentingan pada perilaku individu atau kelompok-kelompok sosial yang secara sengaja diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan tersebut.

Berikut gambar seperti yang dilukiskan oleh Ortwin Renn dalam mendiagnosa peran aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik sebagai sebuah arena perjuangan.



Gambar 1: Model Metafora Arena

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pusat pentas arena adalah ditempati oleh aktor-aktor utama, yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat, aktor politik, SKPD, dan elemen *stakeholder* lain yang berusaha mempengaruhi kebijakan. Pada saat yang bersamaan, ada beberapa kelompok tertentu yang mungkin menaruh perhatian pada sejumlah isu tertentu, sehingga

mereka terlibat dalam arena yang berbeda-beda, sementara kelompok yang lain hanya berkepentingan pada satu isu saja dalam arena tertentu pula. Sedangkan peran penegak aturan adalah diwakili oleh pemerintah yang berfungsi menjamin agar aktor mematuhi aturan formal dan mengkoordinasikan berlangsungnya proses interaksi dan negoisasi.

Dalam memahami keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tentulah sangat tidak mudah, karena apa yang tercermin di permukaan dari motif aktor untuk terlibat dalam pentas arena kebijakan belum tentu mencerminkan motif yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam memahami motif aktor yang terlibat dalam proses kebijakan tergantung kepada; motivasi yang menuntun aktor tersebut untuk berperilaku (pertukaran), kepercayaan politik aktor, serta sumber daya dan pentas para aktor. Terkait dengan motivasi aktor memang sangat *idiosinkratik* (mempribadi), karena motivasi ini menyangkut individu yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu dan ada yang tampak dipermukaan serta ada yang tersembunyi, namun dengan motivasi inilah cara kerja aktor dalam proses tarik ulur kepentingan atau dalam istilahnya terjadi *trade off* antara aktor yang satu dengan yang lainnya. Dengan konsekuensi bahwa upaya mempertemukan antar aktor/*stakeholder* melalui rangkaian kegiatan ini akan menjadi jembatan komunikasi sekaligus dialog otentik yang digagas untuk melakukan percepatan program/kegiatan pembangunan.

#### 1.5. Penutup

Rangkaian agenda kegiatan sebagaimana dicakup diatas merupakan upaya mendekatkan layanan pada masyarakat sebagai upaya Bung Rendra sebagai Bupati Malang beserta segenap Pemerintahan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, dengan dukungan segenap unsur pemerintahan di Kabupaten Malang maka diharapkan akan menjadi titik tolak bagi penguatan tata pemerintahan yang baik, legitimet demokratis serta mampu menyediakan “ruang publik” yang dapat dimanfaatkan semua pihak bagi proses percepatan pembangunan di Kabupaten Malang kedepan yang lebih baik.

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260  
 MALANG - 65119

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/2443/421.205/2013

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang  
 Nomor : 14126/UN.10.3/PG/2013 tanggal Desember 2013 perihal Ijin Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Rosita Devi Milasari / Mhs Malang Fakultas Ilmu  
 Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Implementasi Program Bina Desa Dalam Rangka  
 Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( Studi pada  
 Keputusan Bupati Malang Nomor :  
 180/121/KEP/421.013/2011 tentang penetapan program  
 Bupati Menyapa Rakyat)

Daerah/tempat kegiatan : di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang

Lamanya : 9 Desember 2013 s.d 9 Februari 2014

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati  
 Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 05 Desember 2013

a.n **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MALANG**  
 Kabid Ideologi, HAM dan WASSANG

**BUDIANTO HERMAWAN/SH.Msi**

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

**TEMBUSAN :**

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Malang
3. Sdr. Camat Poncokusumo Kab. Malang
4. Sdr. Kepala Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang
5. Sdr. Mhs Ybs
6. Arsip

**CURRICULUM VITAE**

Nama : ROSITA DEVI MILASARI

NIM : 105030500111009

Tempat dan tanggal lahir : MALANG, 04 SEPTEMBER 1992

Pendidikan : 1. SDN 1 PONCOKUSUMO Tamat tahun 2004  
2. SMPN 1 PONCOKUSUMO Tamat tahun 2007  
3. SMAN 1 TUMPANG Tamat tahun 2010

Pengalaman Kerja : Staff Magang di Bagian Tata Pemerintahan Umum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (Februari  
2013 – Maret 2013)

Pengalaman Organisasi : Anggota PMR Unit SMA Negeri 1 Tumpang

